



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 70 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, perlu disusun perencanaan pembangunan perkebunan tingkat Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan perkebunan berskala ekonomi dalam kawasan yang berdasarkan perencanaan wilayah, diperlukan perencanaan pembangunan perkebunan yang tersusun sesuai dengan peruntukan ruang wilayah kerja pembangunan perkebunan Provinsi Banten;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan komoditas unggulan Provinsi Banten perlu diberikan arah, pedoman dan pengendalian sesuai dengan tata ruang wilayah pembangunan perkebunan di wilayah Provinsi Banten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Perkebunan Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Peruntukan Kawasan Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Banten.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Gubernur adalah Gubernur Banten.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
7. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota se-Provinsi Banten.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
9. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
10. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
11. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/ atau jasa perkebunan.
12. Sentra Perkebunan adalah bagian dari kawasan yang memiliki ciri tertentu dimana didalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk perkebunan unggulan yang merupakan kegiatan ekonomi yang telah membudaya yang ditunjang oleh prasarana dan sarana produksi.
13. Kawasan Perkebunan adalah gabungan dari sentra-sentra perkebunan yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya maupun infrastruktur sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luas minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah.
14. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
15. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.

16. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
17. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
18. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
19. Kelompok (grup) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sama lainnya mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan/atau hubungan keuangan.
20. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
21. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
22. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
23. Izin Usaha Perkebunan selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
24. Perkebunan Rakyat adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumah tangga.

25. Kelompok Tani adalah kumpulan petani (dewasa, wanita, pemuda) yang terikat secara non formal dalam suatu wilayah kelompok yang bekerjasama atas dasar saling asih, saling asah dan saling asuh bagi keberhasilan usaha pertaniannya yang diketuai oleh seorang petani/kontak tani.
26. Tanaman Tahunan adalah tanaman perkebunan yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen.
27. Tanaman Semusim adalah tanaman perkebunan yang pada umumnya berumur kurang dari satu tahun dan pemanenannya dilakukan satu atau beberapa kali.
28. Produksi Perkebunan adalah banyaknya hasil dari tiap tanaman perkebunan (tahunan, semusim) menurut bentuk wujud produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas panen.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dan stake holder terkait pemanfaatan dan penggunaan ruang wilayah dalam rangka penyelenggaraan perkebunan yang ditujukan pada pengembangan kawasan perkebunan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan dalam rangka pemanfaatan sumber daya perkebunan secara adil dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. optimalisasi dan pemanfaatan lahan untuk pengembangan komoditas unggulan sesuai kawasan perkebunan berbasis komoditas;
 - b. peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya perkebunan;
 - c. mewujudkan kelembagaan pengelola perkebunan yang efektif dan efisien;
 - d. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan perkebunan; dan
 - e. peningkatan riset dan teknologi perkebunan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Rencana Pembangunan Perkebunan meliputi :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM
 - c. BAB III STRATEGI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH
 - d. BAB IV PROYEKSI PROSPEK DAN ARAH PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
 - e. BAB V PENUTUP
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KAWASAN PERKEBUNAN

Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan Kawasan Perkebunan Provinsi.
- (2) Pengembangan kawasan perkebunan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:
 - a. tahap inisiasi
 - b. tahap penumbuhan
 - c. tahap pengembangan
 - d. tahap pemanfaatan
 - e. tahap integrasi antar kawasan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 16 Desember 2014

Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 16 Desember 2014

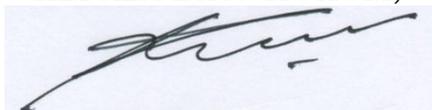
Plt.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 70 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN PROVINSI BANTEN

RENCANA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI BANTEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub sektor perkebunan merupakan bagian dari sektor pertanian dalam arti luas yang memiliki peran penting dalam kerangka pembangunan ekonomi karena sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyedia bahan baku industri, penghasil devisa negara, penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan petani. Secara riil subsektor perkebunan menjadi pendorong tumbuhnya industri-industri penyedia sarana produksi perkebunan dan secara makro dapat menekan laju pertumbuhan pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja. Sub sektor perkebunan memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah yang berimplikasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Oleh karena itu, agar sektor perkebunan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan serta dapat mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, tiga pendekatan penting yang perlu diperhatikan yaitu pendekatan biologi, pendekatan ekonomi, dan pendekatan sosial. Sehingga dalam jangka panjang, keberhasilan pembangunan perkebunan akan dapat menumbuhkan perekonomian secara makro yang saling terkait antar sektor, mengingat pertumbuhan subsektor perkebunan saling berpengaruh dengan sektor lain.

Pembangunan perkebunan di Provinsi Banten bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan komoditas unggulan dalam kawasan yang bernilai ekonomi dan

berdaya saing tinggi, tanpa meninggalkan keserasian dan keselarasan ekosistem serta kearifan lokal. Tujuan tersebut dapat dicapai jika didukung oleh penyediaan dan penyaluran sarana produksi, investasi, teknologi, sistem perdagangan yang efektif dan efisien serta berdasarkan manfaat dari keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, sehingga komoditiperkebunan memiliki daya saing baik di pasar domestik maupun pasar global. Untuk mewujudkan komoditi yang berdaya saing diperlukan hubungan yang terintegrasi antara penyedia sarana produksi, dukungan investasi dan permodalan, teknologi dan proses produksi, serta pengolahan hasil, pemasaran di samping dukungan kelembagaan.

Pembangunan subsektor perkebunankedepan, menitikberatkan pada pengembangan kawasan dan komoditas strategis, kemitraan yang menjamin ketersediaan komoditas perkebunan dengan senantiasa mempertimbangkan aspek keberlanjutan berbasis sosial dan budaya, secara makro tidak hanya diarahkan pada pemenuhan pasar lokal tetapi juga harus diorientasikan pada peningkatan ekspor. Dampak sosial yang diharapkan dari pembangunan perkebunan dalam jangka panjang adalah perluasan lapangan kerja dan lapangan usaha serta berdampak langsung terhadap penurunan jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.

B. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Perkebunan yaitu:

- a. Menyediakan ruang dan tempat sebagai pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan pengembangan perkebunan;
- b. Menyusun program dan analisa untuk pembuatan kebijakan pembangunan perkebunan di Provinsi Banten.

2. Tujuan

Menyusun acuan untuk pembangunan perkebunan kedepan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Memandu perencanaan pembangunan perkebunan ditingkat Kabupaten/Kota, sehingga dapat mengembangkan komoditas unggulan perkebunan yang berdaya saing tinggi.

- b. Menyusun bahan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam perencanaan pengembangan komoditas perkebunan secara bertahap berkelanjutan berdasarkan standar akademik dan manajemen yang baik.
- c. Sebagai bahan kebijakan pembangunan perkebunan dalam penyusunan RT/RW.
- d. Mengarahkan masyarakat petani perkebunan dan pelaku usaha untuk membuka usaha dan investasi baru dalam pengembangan komoditas unggulan.
- e. Membuat pedoman baru subsektor perkebunan

3. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Perkebunan ini meliputi:

- a. Wilayah Provinsi Banten berdasarkan kondisi saat ini wilayah seperti letak geografis, kondisi topografi, kondisi geologi, jenis tanah, jumlah penduduk, kondisi ekonomi.
- b. Kondisi saat ini dari komoditas perkebunan, baik jenis komoditas, produksi, produktivitas.
- c. Kebijakan pembangunan perkebunan di Provinsi Banten yang tertuang dalam RTRW Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota yang merupakan payung berbagai kebijakan pembangunan perkebunan di Provinsi Banten baik secara spasial ataupun sektoral.

4. Manfaat

Rencana Pembangunan Perkebunan bermanfaat untuk :

- a. Pembangunan subsektor perkebunan di Provinsi Banten, terutama yang berkaitan dengan pengembangan komoditas unggulan, investasi yang diselaraskan dengan pembangunan subsektor perkebunan di Kabupaten/Kota.
- b. Merancang kebijakan strategis yang berkaitan dengan rencana pembangunan subsektor perkebunan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat pusat.

- c. Sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan teknis bagi kepala daerah dalam menetapkan kebijakan, perencanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan.
- d. Sebagai pedoman dalam mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perkebunan secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan.

5. Dasar Hukum.

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Perkebunan:

- a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3478);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4010);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4725);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan OT.140/9/2009 Tentang Kriteria Teknis Peruntukan Kawasan Pertanian;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
- j. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 sebagaimana telah diubah Nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Jenis Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan Komoditas Perkebunan;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Provinsi Banten 2010-2030;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012-2017.

6. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. RKPD dan RKA-SKPD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dokumen RPJMD juga diacu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/ Kota dan berfungsi dalam pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Pembangunan Perkebunan termasuk kedalam rencana jangka menengah dalam periode 5 (lima) tahun yang tidak terikat masa waktunya dengan RPJMD Provinsi Banten

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Administrasi Pemerintah

Pemerintahan Provinsi Banten terbagi dalam 8 (delapan) wilayah Pemerintah Kabupaten/ Kota, sebagaimana Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Banten

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Kabupaten Lebak	28	340	5
2	Kabupaten Pandeglang	35	326	13
3	Kabupaten Serang	29	326	-
4	Kabupaten Tangerang	29	246	28
5	Kota Cilegon	8	-	43
6	Kota Serang	6	-	66
7	Kota Tangerang	13	-	104
8	Kota Tangerang Selatan	7	-	54
	JUMLAH	155	1.238	313

Sumber : BPPMD Prov. Banten, 2014

B. Kondisi Umum

1. Letak Geografis

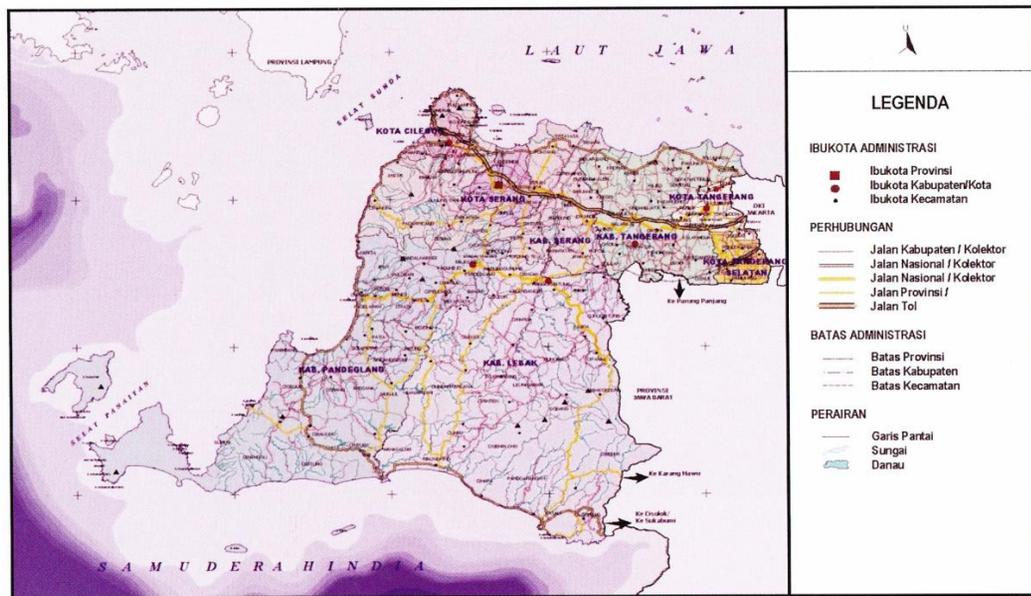
Luas wilayah Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten adalah 8.651,20 km². Provinsi Banten terletak pada batas Astronomi 105^o 1' 11" - 106^o 7' 12" Bujur Timur dan 5^o 7' 50" - 7^o 1' 1" Lintang Selatan. Dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Sunda.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Provinsi Banten



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2011

Provinsi Banten mempunyai posisi strategis yaitu pada lintas perdagangan nasional dan internasional. Wilayah laut Banten salah satu jalur laut potensial begitupun Selat Sunda merupakan salah satu jalur yang dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia, Selandia Baru, dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia dan Singapura. Selain itu Banten merupakan jalur perlintasan/penghubung dua pulau besar di Indonesia, yaitu Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan posisi geografis dan pemerintahan maka wilayah Banten terutama Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang merupakan wilayah penyangga bagi Ibukota Negara. Secara ekonomi wilayah Banten mempunyai banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta dan sangat mungkin menjadi pelabuhan alternatif dari Singapura.

2. Topografi

Topografi wilayah Provinsi Banten berkisar pada ketinggian 0-2000 m di atas permukaan laut (dpl). Ketinggian 0-200 m dpl terdapat di Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang, Ketinggian 201-2.000 m dpl

terdapat di Lebak Tengah dan sebagian kecil Kabupaten Pandeglang, dan ketinggian 501-2.000 m dpl terdapat di Lebak Timur (Puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun).

Kondisi topografi wilayah Banten secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu wilayah dataran dengan kemiringan 0-8 %, wilayah bergelombang dengan kemiringan 8-15 %, dan wilayah curam dengan kemiringan 15-40 %. Sebaran wilayah menurut kemiringan secara rinci di Provinsi Banten disajikan pada Tabel 2.2. Kondisi kemiringan lahan di Provinsi Banten terbagi menjadi tiga kondisi yang ekstrim, yaitu:

- a. Dataran, yang sebagian besar terdapat di daerah Utara Provinsi Banten yang menjadi lahan yang sangat potensial untuk pengembangan seluruh jenis fungsi kegiatan. Lahan ini tersebar di sepanjang pesisir Utara Laut Jawa, sebagian wilayah Serang, sebagian Kabupaten Tangerang bagian Utara serta wilayah Selatan yaitu di sebagian pesisir Selatan dari Pandeglang hingga Kabupaten Lebak.
- b. Perbukitan landai sampai sedang dengan tekstur bergelombang rendah sampai sedang, yang sebagian besar dataran landai terdapat di bagian Utara meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, serta bagian Utara Kabupaten Pandeglang.
- c. Daerah perbukitan terjal, terdapat di Kabupaten Lebak, sebagian kecil Kabupaten Pandeglang bagian Selatan dan Kabupaten Serang.
- d. Perbedaan kondisi alamiah ini turut berpengaruh terhadap timbulnya ketimpangan pembangunan yang semakin tajam, yaitu wilayah sebelah Utara memiliki peluang berkembang relatif lebih besar dari pada wilayah sebelah Selatan.

Tabel 2.2
Sebaran Wilayah menurut Kemiringan di Provinsi Banten

No.	Wilayah	Kelerengan	Jumlah sebaran	
			Luas (Ha)	%
1	Datar	0 - 8%	43.294,02	4,62
2	Bergelombang	8 - 15%	64.941,03	6,93
3	Agak Curam	15 - 25%	28.253,24	30,44
4	Curam	25 - 40%	357.503,65	38,15
5	Sangat Curam	Diatas 40%	186.108,06	19,86
s LUAS			680.100,00	100,00

umber: BPS Provinsi Banten, 2011

3. Keadaan Iklim

Iklim wilayah Provinsi Banten sangat dipengaruhi oleh Angin Monson (*Monson Trade*) dan Gelombang *La Nina* atau *El Nino*. Saat musim penghujan (Nopember-Maret) cuaca didominasi oleh angin Barat (dari Sumatera, Samudra Hindia sebelah Selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan. Pada musim kemarau (Juni-Agustus), cuaca didominasi oleh angin Timur yang menyebabkan wilayah Banten mengalami kekeringan yang keras terutama di wilayah bagian pantai utara, terlebih lagi bila berlangsung *El Nino*.

Temperatur di daerah pantai dan perbukitan berkisar antara 22 °C dan 32 °C, sedangkan suhu di pegunungan dengan ketinggian antara 400-1.350 m dpl mencapai antara 18°C-29 °C.

Curah hujan :

- a. September-Mei Curah hujan tertinggi sebesar 2.712-3.670 mm mencakup 50 % luas wilayah Kabupaten Pandeglang sebelah Barat dan curah 335-453 mm dan mencakup 50 % luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50 % luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah Utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang.
- b. Pada musim kemarau, curah hujan tertinggi sebesar 615-833 mm pada bulan April-Desember mencakup 50 % luas wilayah Kabupaten Serang sebelah utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50 % luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah Utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang,

c. sedangkan curah hujan terendah pada musim kemarau sebanyak 360-486 mm pada bulan Juni-September mencakup 50 % luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah selatan dan 15 % luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Tenggara.

4. Jenis Tanah

Berdasarkan sumber daya tanah wilayah Provinsi Banten secara geografis terbagi menjadi dua tipe tanah yaitu kelompok tipe tanah sisa atau residu dan kelompok tipe tanah hasil angkutan. Masing-masing tipe tanah yang terdapat di wilayah Provinsi Banten tersebut antara lain Aluvial pantai dan sungai, Latosol, Podsolik Merah Kuning, Regosol, Andosol, Brown Forest, dan Glei.

Jenis tanah di Provinsi Banten didominasi oleh Tanah Podsolik Merah Kuning (47,20 %) yang bersifat peka terhadap erosi, selanjutnya tanah Latosol (42,26 %) yang bersifat agak peka terhadap erosi. Ketahanan tanah terhadap proses erosi (*erodibilitas*) tersebut sangat ditentukan oleh tekstur, stuktur, permeabilitas, dan kandungan bahan organik tanah.

Tabel 2.3
Penyebaran Jenis Tanah di Provinsi Banten

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Jumlah (%)
1	Aluvial	59.974,40	6,40
2	Latosol	396.108,46	42,26
3	Podsolik Merah Kuning	442.311,20	47,20
4	Regosol	10.589,23	1,13
5	Lainnya	37.577,71	4,01
JUMLAH		946.561,0	101
		0	

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2011

5. Potensi

a. Potensi Sumberdaya Manusia

Penduduk merupakan bagian tak terpisahkan dari program pembangunan berkelanjutan, karena penduduk merupakan subyek pembangunan. Semua jenis pembangunan akan diintegrasikan dan diarahkan untuk meningkatkan

kualitas dan kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan penduduk Provinsi Banten selama 5 tahun terakhir rata-rata 2,20 %, kedepan pertumbuhan ini kemungkinan akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan pemukiman wilayah kota dan adanya pemekaran kota.

Berdasarkan angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 68,8 dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 2,1 % menunjukkan bahwa potensi SDM Provinsi Banten cukup mendukung perkembangan pembangunan. Pengaruh dari DKI Jakarta akan sangat mewarnai pola, semangat dan wacana pembangunan yang sedang dan akan berlangsung di Banten. Tingginya angka melek huruf yang mencapai 95 % merupakan salah satu modal dasar dalam mempercepat pembangunan daerah. Berkembangnya lembaga pendidikan, terutama lembaga perguruan tinggi diharapkan akan membawa pengaruh dalam upaya percepatan pembangunan di Provinsi ini, termasuk dalam pembangunan perkebunan.

Kondisi kesejahteraan keluarga masih memerlukan perhatian yang memadai, karena 23 % keluarga di Banten merupakan penduduk pra sejahtera dan 26 % pada kelompok keluarga sejahtera 1, kedua golongan ini yang mencapai 49 % pada umumnya adalah masyarakat pertanian termasuk perkebunan. Pembinaan, pendampingan dan pengawalan kepada keluarga ini harus dilakukan secara intensif agar posisi mereka dapat meningkat lebih baik.

Keberhasilan peningkatan kondisi keluarga sejahteran merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai kegiatan pembangunan daerah. Intensifikasi kegiatan perkebunan dan pengembangan produk-produk perkebunan sesuai dengan pohon industri dan peluang pasarnya akan merupakan kegiatan yang sangat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 25,8 % penduduk di Provinsi Banten merupakan penduduk yang bekerja di sektor pertanian dalam arti luas, karena hal ini merupakan kenyataan historis. Sebagian besar masyarakat yang bergerak di bidang pertanian adalah mereka yang memiliki keterampilan bertani, namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan, sehingga bersifat statis, kurang memiliki keberanian untuk mencoba teknologi baru.

Lambatnya perubahan ini menyebabkan pertanian selalu tertinggal dalam upaya mengejar potensi produktivitasnya. Teknologi anjuran yang mampu memberikan keunggulan produksi, ramah lingkungan dan berkelanjutan telah disediakan oleh para peneliti dari balai penelitian dan perguruan tinggi, namun belum dimanfaatkan oleh sebagian besar petani. Disamping itu serangkaian penelitian dan rekayasa alat pengolahan hasil juga telah dilakukan, dengan menggunakan serangkaian alat tersebut akan menghasilkan produk yang bebas kontaminasi mikroorganisme berbahaya, menghindarkan resiko kehilangan hasil dan mempersingkat waktu pengolahan serta mampu memanfaatkan hasil samping yang dapat memberikan nilai tambah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan petani, kurangnya transfer teknologi sebagai akibat kurang memadainya tenaga penyuluh atau petugas pendamping dan ketiadaan modal petani untuk menyediakan agroinput bagi usahatannya.

b. Sumber Daya Alam

Keadaan iklim suatu daerah merupakan salah satu faktor yang cukup berperan dalam menentukan produktivitas tanaman. Daerah yang mengalami musim kemarau panjang akan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Apabila terdapat lapisan cadas, tekstur terlalu berat (kandungan liat tinggi) dan tekstur ringan (kandungan pasir tinggi) serta drainase jelek mengakibatkan pertumbuhan tanaman tertekan dan produktivitas rendah.

Persyaratan tumbuh atau persyaratan penggunaan lahan yang diperlukan oleh masing-masing komoditas mempunyai batas kisaran minimum, optimum, dan maksimum untuk masing-masing karakteristik lahan. Kisaran untuk kualitas lahan yang optimum bagi kebutuhan tanaman atau penggunaan lahan merupakan batasan bagi kelas kesesuaian bahan yang paling sesuai (S1). Sedangkan kualitas lahan yang di bawah optimum merupakan batasan kesesuaian lahan antara kelas yang cukup sesuai (S2), dan untuk sesuai marginal (S3), serta lahan-lahan yang secara fisik tidak sesuai (N). Keterbatasan kesesuaian

lahan dapat diatasi melalui rekayasa pengelolaan lahan, seperti dengan pembuatan lobang tanam berukuran besar kemudian diberi pupuk organik yang cukup, dan penyiraman dengan irigasi teknis.

Provinsi Banten bagian Selatan mempunyai jumlah curah hujan rata-rata mencapai 2.500-3.000 mm/tahun, curah hujan yang terendah terjadi di daerah Banten Utara dengan jumlah curah hujan rata-rata 2000 mm/th. Distribusi hujan sangat bervariasi, dalam satu tahun terdapat bulan-bulan kering yang mencolok yaitu 2-3 bulan secara berturut-turut terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan September pada setiap tahunnya.

Jenis tanah di wilayah Banten Selatan, merupakan asosiasi tanah latosol, alluvial, dan podsolik merah kuning. Jenis tanah alluvial banyak terdapat di daerah muara dan aliran sungai sebagai hasil dari endapan lumpur. Tanah alluvial banyak terdapat di Banten Utara, sedangkan tanah latosol penyebarannya banyak terdapat di wilayah Pandeglang bagian Utara dan daerah Gunung Kencana. Tetapi yang mendominasi adalah jenis tanah podsolik merah kuning. Tekstur tanahnya cukup berat sehingga perembesan air ke lapisan bawah kurang baik. Solum tanah cukup dalam, kesuburan kimianya tergolong rendah, dengan pH tanah antara 4,5 – 6. Pada Tabel 5.13 digambarkan jenis tanah, tekstur, kedalaman, drainase, kesuburan dan kelerengan tanah di Banten bagian Selatan.

Tabel 2.4

Gambaran Umum Kelas Tekstur dan Kedalaman efektif Tanah di Wilayah Banten Selatan

Jenis Tanah	Tekstur Tanah	Kedalaman Efektif	Drainase	Kesuburan	Lereng
Latosol	sedang	> 90	Baik	rendah	0-3
Latosol	sedang	60-90	agak cepat	rendah	3-15
Ass Latosol	halus	60-90	Cepat	rendah	15-40
Podsolik Kuning	sedang	60-90	Baik	rendah	3-15
Podsolik MK	berat	60-90	Lambat	rendah	15-40

Sumber : Perwilayahan Komoditas Pertanian Kabupaten Pandeglang dan Studi pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Lebak, 2003.

Luas areal dan potensi pengembangan perkebunan menurut kabupaten dan Data Statistik Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Provinsi Banten Tahun 2013, dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.5

Data Luas Areal Dan Potensi Pengembangan Perkebunan Provinsi Banten 2013					
No	Kabupaten	Areal Potensial (ha)	Areal Eksisting (ha)	Areal yang masih memungkinkan untuk pengembangan	
				Yang sudah memiliki Usaha Perkebunan (HGU/ IUP (ha)	Areal yang masih dapat dikembangkan (ha)
1	Kabupaten Pandeglang	85,383.19	72,989.33	7,337.90	5,055.96
2	Kabupaten Serang	39,838.80	20,687.60	386.60	18,764.60
3	Kabupaten Lebak	102,682.65	70,699.59	15,278.69	16,704.37
4	Kota Cilegon	6,611.28	3,928.28	-	2,683.00
5	Kabupaten Tangerang	17,602.21	8,132.91	-	9,469.30
6	Kota Tangerang	-	-	-	-
7	Kota Serang	1,225.14	995.64	-	229.50
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-
JUMLAH		253,343.27	177,433.35	23,003.19	52,906.73

Berdasarkan Tabel 2.6 areal potensial yang terluas adalah Kabupaten Lebak yaitu 102.682,65 ha dan areal potensial terendah 6.611,28 ha. Areal saat ini yang terluas adalah Kabupaten Pandeglang yaitu 72.989,33 ha dan saat ini yang terkecil Kota Serang yaitu 995,64 ha

c. Sarana dan Prasarana

Pembangunan perkebunan yang berkembang di perdesaan, disamping ditentukan adanya dukungan dari faktor-faktor produksi juga sangat dipengaruhi kondisi sarana dan prasarana atau infrastruktur. Di tingkat budidaya infrastruktur yang diperlukan antara lain adalah jaringan jalan (jalan utama, jalan antar wilayah pedesaan, jalan usahatani dan jalan produksi), tersedianya kios sarana produksi pertanian dan alat-mesin pertanian. Di tingkat hasil produksi diperlukan adanya unit pengolahan hasil, gudang penyimpanan hasil, terminal/sub terminal agribisnis dan pasar.

Jaringan jalan merupakan sarana transportasi darat yang mendominasi pelayanan pergerakan angkutan barang dan penumpang di Provinsi Banten. Pada tahun 2012 tingkat kemantapan jaringan jalan provinsi sepanjang 852,88 km dalam kondisi mantap (baik dan cukup) sebesar 75,62 % (644,96km) dan kondisi rusak 24,38 % (207,92 km). Hal ini disebabkan karena sudah habisnya umur rencana jalan padasebagian besar ruas jalan di provinsi, sehingga kondisi struktur jalan menjadi labil. Rendahnya tingkat kemantapan jalan ini juga disebabkan tingginya frekuensi bencana alam serta beban lalu lintas yang sering melebihi standar Muatan Sumbu Terberat (MST). Selain itu, kurangnya jaringan jalan Tol, serta belum teritegrasinya seluruh jaringan jalan di Banten dengan baik, termasuk dengan sistem jaringan Jalan Tol, menyebabkan rendahnya kualitas dan cakupan wilayah pelayanan infrastruktur jaringan jalan di Banten.

Berdasarkan jenis permukaan jalan, sebagian besar sudah diaspal sepanjang 660,715 km (77,47%), dan hanya 1,5 km (0,17%) permukaan jalan yang berkerikil.

Tabel 2.7
Panjang Jalan Menurut Tingkat Pengelolaan, Jenis Permukaan, Kondisi Jalan dan Kelas Jalan di Provinsi Banten

Uraian	Status Jalan (km)	
	Negara	Provinsi
I. Jenis Permukaan		
1. Diaspal	476,491	660,715
2. Kerikil	-	1,500
3. Tanah	-	19,440
4. Beton		171,233
Jumlah	476,491	852,888
II. Kondisi Jalan		
1. Baik	28,370	429,420
2. Sedang	402,401	215,544
3. Rusak	26,910	128,549
4. Rusak Berat	188,10	79,375
Jumlah	476,491	852,888

Sumber : Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, 2012

d. Teknologi

Penerapan Praktek Pertanian yang baik dan Praktek Manufacture yang baik, merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan di tingkat lapangan. Sehubungan dengan itu diperlukan tuntunan teknologi yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam mencapai Praktek Pertanian yang baik dan Praktek Manufacture yang baik tersebut.

Pada dasarnya teknologi telah tersedia di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian maupun di Pusat Penelitian Perkebunan, hasil penerapan teknologi budidaya dengan menggunakan komponen-komponen teknologi anjuran menunjukkan peningkatan produksi tanaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknik budidaya secara tradisional. Balai Penelitian telah merakit paket budidaya yang efisien, mudah diterapkan dan ramah lingkungan. Budidaya yang harus diterapkan adalah mengganti komponen-komponen budidaya tradisional yang tidak menguntungkan dengan komponen yang lebih baik dan sinergis. Penerapan budidaya yang diperbaiki ini mampu meningkatkan produktivitas mencapai tiga kali lipat dari produktivitas yang pernah diapai melalui cara tradisional. Kendala utama yang dihadapi oleh petani untuk dapat menerapkan budidaya anjuran diantaranya adalah : modal dan belum dikuasainya cara pelaksanaan budidaya secara baik dan professional. Dukungan modal usaha dengan cara kredit ringan, serta pelatihan budidaya anjuran di sentra-sentra pengembangan komoditas juga perlu dilakukan.

Demikian juga dengan teknologi agroindustri pedesaan, di Provinsi Banten pada dasarnya telah berkembang agroindustri untuk pengolahan berbagai komoditas, antara lain :

1. Unit pengolahan kelapa yang menghasilkan kopra, serat serabut, arang tempurung, nata de coco dan Virgin Coconut Oil;
2. Unit pengolahan karet yang menghasilkan lateks pekat, sheet dan SIR;

3. Unit pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan Curt Palm Oil dan inti sawit, beberapa pengusaha telah memproses menjadi minyak goreng;
4. Unit pengolahan cengkeh, selain menghasilkan bunga cengkeh kering juga telah dihasilkan eugenol/minyak Atsiri cengkeh;
5. Unit pengolahan kopi, selain menghasilkan kopi biji kering, juga banyak pengolahan kopi yang menghasilkan kopi bubuk, kopi mix dan kopi instan;
6. Unit pengolahan kakao, menghasilkan biji kakao kering, bubuk kakao, minyak kakao dan telah terdapat pengolahan makanan ringan kakao; dan
7. Unit pengolahan aren, umumnya menghasilkan gula aren cetak dan gula semut (butiran).

Berdasarkan hasil inventarisasi industri pengolahan produk perkebunan Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang dan Kota Tangerang terdapat 210 kelompok usaha/perusahaan yang terdiri dari :

1. Kabupaten Pandeglang : 76 perusahaan/kelompok usaha
2. Kabupaten Lebak : 62 perusahaan/kelompok usaha
3. Kabupaten Serang : 32 perusahaan/kelompok usaha
4. Kabupaten Tangerang : 17 perusahaan/kelompok usaha
5. Kota Tangerang : 23 perusahaan/kelompok usaha

Pengembangan agroindustri pedesaan merupakan pilihan strategis dalam meningkatkan pendapatan dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Selama ini masyarakat pedesaan cenderung menjual produk dalam bentuk primer, karena lokasi industri umumnya berada di daerah kota atau mendekati kota. Hal ini berakibat pada nilai tambah produk pertanian maupun perkebunan lebih banyak mengalir ke wilayah kota. Upaya untuk mengatasi hal tersebut perlu diwujudkan karena manfaat dan dampak pembangunan perkebunan akan secara langsung berada di pedesaan.

e. Kelembagaan

Usaha masyarakat pedesaan tidak dapat dikembangkan secara individual, karena akumulasi asetnya tidak akan mencukupi untuk menggalang kekuatan ekonomi. Kelembagaan petani sangat penting karena merupakan wadah menyatukan diri dalam menggalang kebersamaan untuk menjalankan aktivitas usahatani sehingga terbentuk organisasi tani yang mandiri, mampu melayani dan menggerakkan potensi anggotanya dengan manajemen yang profesional dan transparan sehingga mampu berdampingan dan bekerjasama dengan mitra usaha. Kelembagaan yang dibangun diawali dengan pembentukan kelompok tani sebagai lembaga untuk melakukan koordinasi dan *supervise* terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing anggotanya. Kelompok-kelompok tani tersebut perlu disatukan dalam Forum Koordinasi atau dalam Gabungan kelompok Tani (Gapoktan) berdasarkan atas kesadaran bersama akan pentingnya kebersamaan beberapa kelompok. Apabila Gapoktan tersebut telah mampu berkembang secara efektif dan efisien serta memiliki kekuatan yang besar dan berfungsi bagi para anggotanya, maka kelembagaan tersebut dapat ditingkatkan dan dimantapkan dalam bentuk perkoperasian yang memiliki kekuatan hukum dalam berorganisasi dan berusaha.

Pada saat ini jumlah kelompok tani di Provinsi Banten sebanyak 921 kelompok. Berdasarkan klasifikasinya pada Tabel 2.8. Sebagian besar kelompok tani 500 kelompok tani atau 54,29 % termasuk ke dalam kelompok tani kelas pemula dan 0,43% termasuk dalam kelompok tani kelas utama.

Tabel 2.8
Sebaran Kelompok Tani per Kabupaten per Kelas Kelompok
Di Provinsi Banten

Kabupaten	Kelas Kelompok Tani				Jumlah
	Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
1. Serang	65	66	189	2	322
2. Pandeglang	151	72	10	2	235
3. Lebak	284	80	-	-	364
Total	500	218	199	4	921

Sumber : Statistik Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, 2007 dan Inventarisasi Dan Verifikasi Data Kelompok Kehutanan dan Perkebunan,

f. Keragaan dan Kinerja Komoditas

1. Luas Areal dan Produksi Perkebunan

Berdasarkan status kepemilikan dan pengelolaan perkebunan di Provinsi Banten, secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga yaitu Perkebunan Rakyat (PR), Perkebunan Besar Negara (PBN), dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang tersebar di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

Luas Areal untuk komoditas strategis perkebunan rakyat di Provinsi Banten didominasi oleh tanaman kelapa diikuti oleh karet, kopi, kelapa sawit, kakao dan cengkeh. Produktivitas tanaman perkebunan rakyat masih sangat rendah dibandingkan dengan standar produktivitas perkebunan nasional, hanya komoditas cengkeh rakyat yang hampir mendekati standar produktivitas nasional

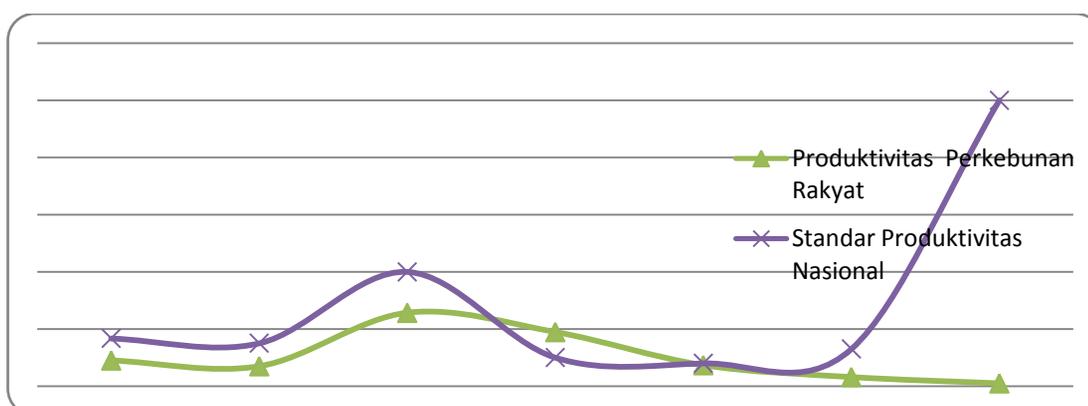
Tabel 2.9.
Luas Areal dan Produksi Komoditas Strategis Perkebunan
Rakyat di Provinsi Banten

No.	Komoditas	Luas (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Kg/ha)	Standar Produktivitas (Kg/Ha)
1	Karet	28.787,10	13.137,06	990,21	1.670
2	Kelapa	92.762,45	52.565,04	710,82	1.500

3	Kelapa Sawit	20.261,15	34.466,20	3.004,72	4.000
4	Kakao	8.067,85	3.084,09	776,68	1.350
5	Cengkeh	13.029,05	4.709,63	587,45	800
6	Kopi	6.737,00	2.607,61	479,95	1.300
7	Aren	3.018,15	1.714,21	4.990,42	10.000

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, 2013

Gambar 2.2
Perbandingan Produktivitas Perkebunan Rakyat dengan Standar Produktivitas Nasional



Saat ini Perkebunan Besar Negara (PBN) hanya mengelola komoditas Kelapa Sawit Dan Kelapa Dalam, sedangkan Perkebunan Besar Swasta (PBS) mengelola komoditas Kakao, Karet Dan Kelapa Sawit.

Tabel 2.10
Luas Areal dan Produksi Komoditas Strategis PBS dan PBN di Provinsi Banten

No.	Komoditas	Perkebunan Swasta (PBS)		Perkebunan Negara (PBN)		Total	
		Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)
1	Karet	6,680.31	3,384.41	2,610.63	1,447.15	9,290.94	4,831.56
2	Kelapa	0	0	50.49	26.27	50.49	26.27
3	Kelapa sawit	2,720.14	7077.62	9,795.97	17,254.61	12,516.11	24,332.23
4	Kakao	1,022.65	597.00	0	0	1,022.65	597.00
5	Cengkeh	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Kopi	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Aren	0	0	0	0	0.00	0.00
Jumlah		10,423.10	11,059.03	12,457.09	18,728.03	22,880.19	29,787.06

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, 2013

Berdasarkan Tabel 2.10 luas tanam karet PBS 6.680,31 ha lebih besar dibandingkan dengan PBN dengan luas tanam 2.610,63 ha, dengan capaian produksi untuk PBS 3.384,41 ton dan untuk PBN 1.447,15. Kelapa sawit sebagian besar berupa

PBN yaitu 9.795,97 ha sedangkan PBS hanya 2.720,14 ha. Kakao dihasilkan dari PBS dengan luas tanam 1.022,65.

Luas Areal perkebunan pada semua kondisi tanaman yaitu, Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), Tanaman Tidak Menghasilkan/ Tanaman Rusak (TT/TR) didominasi oleh Kabupaten Pandeglang yang disusul oleh Kabupaten Lebak pada semua komoditas unggulan kecuali pada tanaman cengkeh dan kopi didominasi oleh Kabupaten Serang. Luas lahan dan produksi tanaman pada kondisi TM lebih luas dan lebih tinggi dibandingkan pada kondisi TBM dan TT/TR pada semua semua komoditas unggulan dan semua kabupaten, kecuali tanaman kelapa di Kabupaten Pandeglang dan tanaman kopi di Kabupaten Serang. Gambaran umum tujuh komoditas strategis perkebunan yang dirinci di tiap Kab/Kota kabupaten di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.11
Luas Areal, Produksi dan Keadaan Tanaman Perkebunan Komoditas
Unggulan di Provinsi Banten Tahun 2013

NO	Jenis Komodita	Kab/kota	Luas Areal Tanaman (Ha)			Jumlah	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
			TBM	TM	TT/TR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kelapa Dalam	Lebak	5,408.71	15,595.42	747.45	21,751.58	12,404.08	795.37
		Pandeglang	5,041.09	37,320.94	1,631.00	43,993.03	12,332.00	330.43
		Serang	1,686.00	10,959.00	1,557.00	14,202.00	8,767.00	799.98
		Tangerang	150.54	6,945.70	1,036.67	8,132.91	5,286.95	761.18
		Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
		Kota Cilegon	492.83	2,601.45	818.00	3,912.28	2,066.03	794.18
		Kota Serang	50.00	513.15	207.50	770.65	314.10	612.09
	Sub Total	12,829.17	73,935.66	5,997.62	92,762.45	41,170.15	556.84	
2	Kelapa Sawit	Lebak	3,374.87	7,447.69	1,193.00	12,015.56	19,943.99	2,677.88
		Pandeglang	2,931.61	4,022.98	1,291.00	8,245.59	14,522.21	3,609.81
		Serang	-	-	-	-	-	-
		Tangerang	-	-	-	-	-	-
		Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
		Kota Cilegon	-	-	-	-	-	-
		Kota Serang	-	-	-	-	-	-
	Sub Total	6,306.48	11,470.67	2,484.00	20,261.15	34,466.20	3,004.72	
3	Karet	Lebak	4,956.32	9,350.27	6,997.25	21,303.84	9,018.38	964.50
		Pandeglang	799.81	3,436.78	2,730.58	6,967.17	3,958.90	1,151.92
		Serang	66.19	322.41	-	388.60	326.30	1,012.07
		Tangerang	-	-	-	-	-	-
		Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
		Kota Cilegon	-	-	-	-	-	-
		Kota Serang	-	-	-	-	-	-
	Sub Total	5,822.32	13,109.46	9,727.83	28,659.61	13,303.58	1,014.81	
4	Kopi	Lebak	171.00	1,423.00	91.00	1,685.00	520.10	365.49
		Pandeglang	64.00	2,610.10	270.90	2,945.00	839.59	321.67
		Serang	394.00	1,363.00	311.00	2,068.00	1,214.00	890.68
		Tangerang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
		Kota Tangerang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
		Kota Cilegon	2.00	5.00	0.00	7.00	25.01	5,002.00
		Kota Serang	0.00	32.00	0.00	32.00	8.91	-
	Sub Total	631.00	5,433.10	672.90	6,737.00	2,607.61	479.95	
5	Kakao	Lebak	1,283.20	2,179.85	685.46	4,148.51	2,041.93	936.73
		Pandeglang	885.38	1,129.03	404.93	2,419.34	818.42	724.89
		Serang	709.00	604.00	88.00	1,401.00	175.23	290.11
		Tangerang	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
		Kota Tangerang	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
		Kota Cilegon	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-
		Kota Serang	40.00	58.00	0.00	98.00	48.51	836.38
	Sub Total	2,918.58	3,970.88	1,178.39	8,067.85	3,084.09	776.68	
6	Cengkeh	Lebak	660.30	4,794.00	515.65	5,969.95	2,828.48	590.00
		Pandeglang	647.40	1,977.10	2,390.60	5,015.10	1,466.14	741.56
		Serang	276.00	1,231.00	490.00	1,997.00	413.28	335.73
		Tangerang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
		Kota Tangerang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
		Kota Cilegon	2.00	3.00	3.00	8.00	0.20	67.55
		Kota Serang	15.00	12.00	12.00	39.00	1.53	127.08
	Sub Total	1,600.70	8,017.10	3,411.25	13,029.05	4,709.63	587.45	
7	Aren	Lebak	975.00	1,396.00	125.70	2,496.70	1,384.00	991.40
		Pandeglang	145.02	179.32	101.36	425.70	297.03	1,656.42
		Serang	-	36.00	22.00	58.00	29.14	809.44
		Tangerang	-	-	-	-	-	-
		Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
		Kota Cilegon	-	-	-	-	-	-
		Kota Serang	11.00	17.75	9.00	37.75	4.04	227.67
	Sub Total	1,131.02	1,629.07	258.06	3,018.15	1,714.21	1,052.26	

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, 2013

Pembangunan perkebunan di Provinsi Banten tidak hanya berorientasi pada budidaya (hulu) tetapi bertahap diintegrasikan dengan pembangunan industri pengolahan hasil dan pemasaran berbasis perkebunan mulai dari industri hulu sampai hilir (mencakup pasca panen dan pemasaran hasil).

Usahatani tanaman perkebunan pada umumnya masih diusahakan secara monokultur, sehingga potensi lahan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal, karena faktor kebiasaan masyarakat, keterbatasan modal, tenaga kerja dan kurangnya informasi. Kalaupun ada masyarakat yang mengusahakan secara tumpangsari pada kebunnya, pada umumnya dilakukan tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah teknologi dan baku teknis budidaya sehingga hasil yang diperoleh masih sangat rendah

Selain itu, usahatani yang dikembangkan belum memberikan hasil yang memadai karena kemampuan kewirausahaan pelaku usaha masih rendah, terutama dalam menangkap peluang pasar yang ada, usahatani yang belum memenuhi skala ekonomi dan rendahnya kemampuan dalam mengakses sumber teknologi, informasi dan dana adalah penyebabnya.

a. Perkembangan Areal Perkebunan

Berdasarkan peranan komoditas terhadap perekonomian, utamanya perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja dan penyediaan lapangan usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan sosial budaya masyarakat serta kondisi fisik daerah terdapat tujuh jenis komoditas perkebunan yang potensial di Provinsi Banten secara berurutan berdasarkan luas arealnya adalah kelapa, karet, kelapa sawit, kopi, kakao dan aren. Namun dilihat dari jumlah produksinya secara berurutan adalah komoditas kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, kakao dan aren.

Luas areal semua komoditas unggulan perkebunan dari tahun 2008-2013 relatif stabil, begitu juga dengan produksinya selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.12
Luas Areal Perkebunan yang Potensial di Provinsi Banten Tahun

Jenis Komodita	Kab/kota	LUAS AREAL TANAM (Ha)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	3	4	5	6	7	8	9
Kelapa Dalam	Lebak	18,250.00	19,681.86	21,288.00	21,606.70	21,518.10	21,751.58
	Pandeglang	42,623.00	42,015.00	42,749.03	42,941.13	43,749.03	43,993.03
	Serang	19,517.00	62,258.30	20,095.07	20,290.67	19,149.00	14,202.00
	Tangerang	11,017.00	11,017.00	11,030.02	11,242.31	11,050.21	8,132.91
	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
	Kota Cilegon	4,141.00	4,141.00	4,169.28	4,169.28	4,169.28	3,912.28
	Kota Serang	717.00	715.50	726.65	726.65	728.65	770.65
	Sub Total	96,265.00	139,828.66	100,058.05	100,976.74	100,364.27	92,762.45
Kelapa Sawit	Lebak	10,991.00	11,539.56	12,004.02	12,015.56	12,015.56	12,015.56
	Pandeglang	4,504.00	4,098.98	6,458.45	6,678.45	7,428.45	8,245.59
	Serang	-	-	-	-	-	-
	Tangerang	-	-	-	-	-	-
	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
	Kota Cilegon	-	-	-	-	-	-
	Kota Serang	-	-	-	-	-	-
	Sub Total	15,495.00	15,638.54	18,462.47	18,694.01	19,444.01	20,261.15
Karet	Lebak	17,350.00	20,376.46	20,672.12	20,724.85	21,053.84	21,303.84
	Pandeglang	4,305.00	5,424.29	4,342.31	5,437.85	6,937.85	6,967.17
	Serang	368.00	386.60	386.60	386.60	390.60	388.60
	Tangerang	-	-	-	-	-	-
	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
	Kota Cilegon	-	-	-	-	-	-
	Kota Serang	-	-	-	-	-	-
	Sub Total	22,023.00	26,187.35	25,401.03	26,549.30	28,382.29	28,659.61
Kopi	Lebak	2,050.00	1,684.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00
	Pandeglang	2,679.00	2,955.30	2,955.00	2,955.00	2,955.00	2,945.00
	Serang	4,841.00	3,450.50	4,841.00	4,841.00	2,217.00	2,068.00
	Tangerang	-	-	-	-	-	-
	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
	Kota Cilegon	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	Kota Serang	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	32.00
	Sub Total	9,615.00	8,134.80	9,526.00	9,526.00	6,902.00	6,737.00
Kakao	Lebak	3,835.00	4,026.65	4,135.67	4,148.51	4,148.51	4,148.51
	Pandeglang	1,803.00	1,990.88	2,248.84	2,260.82	2,281.82	2,419.34
	Serang	537.00	562.81	864.50	982.85	1,731.00	1,401.00
	Tangerang	-	-	-	-	-	-
	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
	Kota Cilegon	-	-	-	-	-	1.00
	Kota Serang	-	-	-	-	-	98.00
	Sub Total	6,175.00	6,580.34	7,249.01	7,392.18	8,161.33	8,067.85
Cengkeh	Lebak	5,770.00	5,769.00	5,765.00	5,785.80	5,796.10	5,969.95
	Pandeglang	4,095.00	4,095.60	4,095.60	4,095.60	4,845.60	5,015.10
	Serang	5,454.00	5,453.80	5,453.80	5,453.80	2,301.00	1,997.00
	Tangerang	-	-	160.00	160.00	160.00	-
	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
	Kota Cilegon	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	Kota Serang	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	39.00
	Sub Total	15,447.00	15,446.40	15,602.40	15,623.20	13,230.70	13,029.05
Aren	Lebak	2,298.00	2,438.00	2,438.00	2,463.00	2,475.00	2,496.70
	Pandeglang	317.00	332.85	332.90	332.90	391.60	425.70
	Serang	145.00	152.25	152.23	152.23	52.00	58.00
	Tangerang	-	-	-	-	-	-
	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
	Kota Cilegon	-	-	-	-	-	-
	Kota Serang	36.75	36.75	36.75	39.75	39.75	37.75
	Sub Total	2,796.75	2,959.85	2,959.88	2,987.88	2,958.35	3,018.15

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, 2013

Tabel 2.13
Produksi Perkebunan yang Potensial per Kabupaten di Provinsi Banten

Jenis Komodita	Kab/kota	PRODUKSI (TON)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Kelapa Dalam	Lebak	12,184.00	12,185.58	12,184.58	12,184.49	12,358.27	12,404.08
	Pandeglang	23,138.00	23,015.00	23,138.00	23,138.21	23,541.58	12,332.00
	Serang	12,132.00	12,132.00	12,132.00	12,132.01	9,493.37	8,767.00
	Tangerang	5,757.00	5,757.00	5,757.00	5,757.10	5,757.00	5,286.95
	Kota Tangerang						-
	Kota Cilegon	2,066.00	2,066.03	2,066.03	2,066.03	2,066.03	2,066.03
	Kota Serang	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	314.10
	Sub Total	55,541.00	55,419.61	55,541.61	55,541.84	53,480.25	41,170.15
Kelapa Sawit	Lebak	20,243.00	96,618.27	20,242.79	21,117.75	22,417.17	19,943.99
	Pandeglang	5,622.00	29,992.04	5,622.25	6,497.25	9,072.48	14,522.21
	Serang	-	-	-	-	-	-
	Tangerang	-	-	-	-	-	-
	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
	Kota Cilegon	-	-	-	-	-	-
	Kota Serang	-	-	-	-	-	-
	Sub Total	25,865.00	126,610.31	25,865.04	27,615.00	31,489.65	34,466.20
Karet	Lebak	8,210.00	8,337.35	8,337.35	8,375.97	8,739.75	9,018.38
	Pandeglang	3,169.00	3,254.55	3,254.55	3,293.17	4,171.34	3,958.90
	Serang	293.00	307.86	307.86	307.86	324.64	326.30
	Tangerang	-	-	-	-	-	-
	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
	Kota Cilegon	-	-	-	-	-	-
	Kota Serang	-	-	-	-	-	-
	Sub Total	11,672.00	11,899.76	11,899.76	11,977.00	13,235.73	13,303.58
Kopi	Lebak	500.00	494.20	494.00	508.42	494.00	520.10
	Pandeglang	793.00	1,490.00	793.00	799.24	793.00	839.59
	Serang	981.00	293.20	920.00	922.72	1,206.30	1,214.00
	Tangerang						-
	Kota Tangerang						-
	Kota Cilegon	2.00	25.00	25.00	1.90	25.01	25.01
	Kota Serang	2.00	312.00	7.00	7.32	7.00	8.91
	Sub Total	2,278.00	2,614.40	2,239.00	2,239.60	2,525.31	2,607.61
Kakao	Lebak	1,805.00	1,536.39	1,507.99	1,503.02	2,016.92	2,041.93
	Pandeglang	508.00	538.50	538.55	538.48	629.18	818.42
	Serang	58.00	60.59	60.59	65.50	251.15	175.23
	Tangerang						-
	Kota Tangerang						-
	Kota Cilegon						-
	Kota Serang						48.51
	Sub Total	2,371.00	2,135.48	2,107.13	2,107.00	2,897.25	3,084.09
Cengkeh	Lebak	1,256.00	1,256.00	2,804.67	3,495.58	2,804.45	2,828.48
	Pandeglang	418.00	418.00	2,343.69	1,309.97	1,424.32	1,466.14
	Serang	1,031.00	964.00	2,400.53	2,822.02	439.60	413.28
	Tangerang	53.00	5.00	5.00	11.61	5.07	-
	Kota Tangerang						-
	Kota Cilegon	2.00	2.00	2.00	2.32	0.20	0.20
	Kota Serang	8.00	0.05	0.05	2.44	0.05	1.53
	Sub Total	2,768.00	2,645.05	7,555.94	7,643.94	4,673.69	4,709.63
Aren	Lebak	1,308.00	1,373.66	1,373.66	1,373.93	1,384.00	1,384.00
	Pandeglang	275.00	288.75	288.75	288.81	288.75	297.03
	Serang	39.00	41.27	41.27	41.27	27.13	29.14
	Tangerang						-
	Kota Tangerang						-
	Kota Cilegon						-
	Kota Serang		2.99	2.99	2.99	4.04	4.04
	Sub Total	1,622.00	1,706.67	1,706.67	1,707.00	1,703.92	1,714.21

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, 2013

b. Kelembagaan Sub Sektor Perkebunan Provinsi Banten

Isu strategis tentang dampak pengembangan perkebunan dikaji dari dampak positif dan negatif, sehingga dalam pengembangan perkebunan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan hal ini harus memperhatikan dan menyelaraskan fungsi lingkungan. Dengan kata lain, pengelolaan dan pengembangan perkebunan harus berdasarkan pendekatan biologi, dan ekonomi serta nilai kearifan lokal.

Untuk membangun komoditas perkebunan di Provinsi Banten diperlukan sinergitas antara lembaga-lembaga pemerintah dan dukungan masyarakat Banten. Instansi Perkebunan di Provinsi Banten terdiri atas Instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, Dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang Perkebunan, Balai Penelitian Teknologi Pertanian Provinsi Banten, Perkebunan Besar Negara dan Perkebunan Besar Swasta.

Kelembagaan di tingkat masyarakat terwadahi dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Banten (DPD-APKSI), Asosiasi Petani Kelapa Indonesia Provinsi Banten (DPD-APKI), Asosiasi Petani Kakao Indonesia Provinsi Banten (DPD-APKAI), Asosiasi Petani Karet Indonesia Provinsi Banten (DPD-APKARINDO), Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia Provinsi Banten (DPD-APCI), Kelompok Tani Aneka Usaha Perkebunan, Kelompok Penangkar Bibit dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam Perkebunan. Kelembagaan komoditi yang ada, khususnya asosiasi komoditi diupayakan harus berperan untuk meningkatkan pengembangan komoditi strategis yang telah ditetapkan, meliputi enam (6) komoditas unggul nasional, yaitu kelapa dalam, kelapa sawit, karet, kopi, kakao, cengkeh dan komoditas unggul lokal yaitu aren.

BAB III
STRATEGI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DANKEBIJAKAN
PEMBANGUNAN WILAYAH

A. Strategi Umum

Berdasarkan kondisi perwilayahan perkebunan saat inidan semangat otonomi daerah maka pola pengembangan perkebunan di Provinsi Banten tidak hanya berorientasi pada aspek budidaya tetapi juga harus diintegrasikan dengan pembangunan industri pengolahan hasil dan pemasaran berbasis perkebunan mulai dari industri hulu sampai hilir tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perkebunan antara lain :

1. Tersedianya klon-klon unggul dan rakitan teknologi yang langsung dapat diterapkan petani untuk meningkatkan produktivitas tanaman.
2. Tersedianya lahan yang layak secara teknis dan dapat diusahakan baik secara satu jenis tanaman atau lebih dari satu jenis tanaman/ penganekaragaman.
3. Permintaan produk perkebunan di pasar luar negeri terus meningkat seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat dibanyak negara, disisi lainnegara produsen utama produksinya mulai menurun.
4. Harga komoditas tanaman perkebunan dunia cenderung meningkat seiring dengan pertambahan penduduk.

Tantangan yang dihadapi subsektor perkebunan baik regional maupun nasional meliputi :

1. Tuntutan ekspor-impor bahan mentah dan produk-produk olahan dengan persyaratan mutu produk yang semakin ketat.
2. Pengenaan langsung terhadap ekspor bahan mentah masih belum dapat teratasi sehingga merugikan petani.
3. Adanya permintaan dari konsumen tertentu terhadap beberapa komoditas perkebunan dari Indonesia yang bermutu rendah (tidak difermentasi) yang digunakan sebagai bahan pencampur.

Strategi pembangunan subsektor perkebunan di Provinsi Banten tidak terlepas dari visi Pembangunan Provinsi Banten yaitu “Rakyat Banten Bersatu Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Visi tersebut mendasari pembangunan subsektor perkebunan di Provinsi Banten. Untuk mendukung visi tersebut, pembangunan subsektor perkebunan bermuara pada penghapusan kemiskinan dan kelaparan.

Misi pembangunan Provinsi Banten yang memperkuat pembangunan subsektor perkebunan meliputi :

1. Memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis dan memperluas kesempatan kerja;
2. Mengembangkan dan menata hubungan antar industri dengan orientasi pada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, penggunaan bahan baku lokal unggulan dan penciptaan peluang usaha;
3. Merevitalisasi kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui pengembangan “tiga pintu keluar masuk wilayah Banten”.

Menindaklanjuti uraian diatas maka, berdasarkan visi dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah “Terwujudnya Kelestarian Fungsi Hutan dan Kebun sebagai Sistem Penyangga Kehidupan”. Misi yang dirumuskan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten adalah :

1. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Kebun;
2. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan;
3. Meningkatkan aneka usaha kehutanan dan perkebunan serta jasa lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas kelembagaan masyarakat kehutanan dan perkebunan;
5. Meningkatkan perlindungan, pengamanan hutan dan kebun;
6. Meningkatkan produk unggulan melalui pendekatan pembangunan wilayah (Kawasan).

Berdasarkan visi dan misi tersebut, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan subsektor perkebunan diorientasikan pada :

1. Pengembang komoditi unggulan perkebunan yang memenuhi skala ekonomi dan mengintegrasikan kelembagaan perkebunan mulai dari hulu sampai dengan hilir yang diperkuat dengan kelembagaan penyuluhan dan partisipasi masyarakat pedesaan.
2. Integrasi pembangunan subsektor perkebunan secara vertikal maupun horizontal.
3. Peningkatan investasi dan permodalan.

Prasyarat keberhasilan pembangunan subsektor perkebunan yang berkualitas harus didukung dengan ketersediaan sarana prasarana ekonomi yang mempercepat pertumbuhan kawasan-kawasan strategis perkebunan dan lembaga keuangan baik lembaga perbankan maupun non perbankan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka strategi umum pengembangan subsektor perkebunan meliputi :

1. Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya, meliputi :
 - a. Memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif
 - b. Meningkatkan produktivitas lahan pada kawasan budidaya dengan upaya-upaya intensifikasi, diversifikasi
 - c. Mewujudkan kawasan perkebunan melalui pengembangan komoditas untuk pemberdayaan masyarakat
2. Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi :
 - a. Mengembangkan kegiatan budidaya dengan komoditas unggulan didalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat
 - b. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya guna mendukung ketahanan pangan
3. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan dengan mempertahankan fungsi kawasan pada pedesaan.

Memperhatikan strategi umum tersebut, terdapat strategi dasar yang dapat dijadikan pijakan dalam penetapan strategi khusus pada sub sektor perkebunan, meliputi :

1. Peningkatan produksi , produktivitas dan nilai tambah
2. Pengembangan jaringan kerja antar pelaku usaha dan lembaga perkebunan
3. Pengembangan perkebunan yang kondusif dan berorientasi pasar
4. Penguatan sistem agribisnis perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, mutu dan pendapatan
5. Strategi keterkaitan hulu dan hilir untuk meningkatkan integrasi sistem agribisnis yang menunjukkan hubungan sinergis antara aktivitas ekonomi di budidaya dan industri dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana pola ruang yaitu ruang wilayah untuk kawasan perkebunan, yang meliputi :

1. Penetapan Kawasan Perkebunan yang merupakan gabungan dari sentra-sentra komoditas berdasarkan tingkat perkembangannya, pengembangan kawasan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:
 - a. Tahap Inisiasi
 - b. Tahap Penumbuhan
 - c. Tahap Pengembangan
 - d. Tahap Pemanfaatan
 - e. Tahap Integrasi Antar Kawasan

Proses pengelolaan pengembangan kawasan terbagi kedalam tahapan; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan mencakup indikator keberhasilan kawasan, usulan dan analisis terhadap calon lokasi dan calon komoditas, penentuan lokasi dan komoditas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, selanjutnya penyusunan masterplan/dokumen perencanaan Rintisan Pembangunan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditas ditingkat provinsi dan rencana aksi ditingkat Kabupaten/Kota.

2. Wilayah peruntukan perkebunan diarahkan di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kota Cilegon dengan arahan potensi pengelolaan areal perkebunan seluas 177.433,35 ha

Adapun langkah-langkah menuju keberhasilan pengelolaan peruntukan perkebunan, meliputi :

1. Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan

Meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan lahan menjadikan tekanan terhadap lingkungan perkebunan, yang akhirnya akan mendorong terjadinya alih fungsi lahan perkebunan. Guna memperbaiki kondisi sumberdaya alam yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi ini, maka diperlukan upaya pengembangan dan rehabilitasi komoditas perkebunan yang terencana, terintegrasi dan berkelanjutan.

Peran pemerintah adalah sebagai fasilitator bagi masyarakat perkebunan dan pelaku usaha perkebunan dalam rangka mengembangkan dan merehabilitasi komoditas perkebunan.

2. Pengembangan Aneka Usaha Perkebunan

Pengembangan perkebunan yang berbasis sumberdaya alam tidak hanya diarahkan untuk produksi hulu, melainkan diarahkan kedalam kegiatan diversifikasi, baik diversifikasi horisontal maupun vertikal. Melalui usaha diversifikasi ini diharapkan akan tercipta nilai tambah dan dapat meningkatkan daya saing komoditas perkebunan. Pengembangan aneka usaha ini melibatkan berbagai pelaku usaha perkebunan, baik Perusahaan Besar Negara, Perusahaan Besar Swasta maupun Perkebunan Rakyat. Bentuk kerjasama melalui kemitraan maupun pola Perkebunan Inti Rakyat dikukuhkan untuk menciptakan sinergi antar pelaku usaha perkebunan.

3. Meningkatkan Pengelolaan perkebunan lestari berbasis masyarakat.

Pengelolaan perkebunan dilaksanakan dengan :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas yang berdaya saing tinggi yang berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.
- b. Optimalisasi produksi melalui pemanfaatan sumberdaya alam.

- c. Penggunaan paket teknologi tepat guna yang sesuai dengan keberadaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, dan kondisi sosial dan budaya lokal.
 - d. Pengembangan komoditas potensial sesuai dengan syarat teknis dan peluang pasarnya.
 - e. Pengembangan komoditas yang sudah diusahakan oleh masyarakat, Perusahaan Perkebunan dan pengembangan untuk wilayah bukaan baru.
 - f. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan perkebunan
4. Memantapkan kelembagaan dan keberdayaan masyarakat pelaku usaha perkebunan

Usaha perkebunan masyarakat perdesaan akan lebih kuat jika dilakukan secara bersama-sama yang terikat dalam suatu organisasi atau kelembagaan, sehingga akan memperkuat posisi permodalan, daya tawar dalam menghadapi pasar. Melalui kelembagaan seperti ini posisi petani perkebunan sejajar dengan pelaku usaha lain yang pengelolaannya berbentuk perusahaan, baik perusahaan besar negara maupun perusahaan besar swasta. Kelembagaan ini dapat berupa kelompok tani, gapoktan, koperasi berbadan hukum atau badan usaha lain sejenisnya yang mempunyai kekuatan legal formal.

Petani perkebunan tidak dapat dikembangkan secara individu, karena berbagai keterbatasan yaitu modal, sarana produksi dan teknologi. Keterbatasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai kekuatan ekonomi, oleh karenanya peran kelembagaan ekonomi sangat penting untuk mengintegrasikan dan membentuk pola kerjasama dalam wadah kemitraan. Integrasi usahatani yang terpadu dan pola kerjasama kemitraan dalam penguatan usaha dan pemasaran hasil, hal ini merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkecil resiko usaha, dan mempermudah pengelolaan usaha perkebunan.

Persamaan komoditi perkebunan dan pendekatan kawasan merupakan salah satu dasar untuk pembentukan kelembagaan usaha perkebunan. Asas kebersamaan dan gotong royong yang merupakan nilai kearifan lokal dapat dikembangkan kembali bukan saja dalam bentuk kegiatan sosial tetapi juga dapat dijadikan nilai dasar yang penting untuk pembentukan kelembagaan perkebunan.

Apabila kelembagaan usaha perkebunan tanpa arah dan dasar yang jelas, maka pertumbuhan dan perkembangannya tidak berdampak banyak terhadap pembangunan perkebunan. Kelembagaan yang memiliki nilai dasar dan dinilai cocok dengan karakteristik pelaku usaha perkebunan dapat berbentuk koperasi.

Arah kebijakan umum Pembangunan perkebunan di Provinsi Banten dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kebijakan pemberdayaan masyarakat perkebunan yang dioperasionalkan melalui upaya Pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi pelaku usaha perkebunan, pengembangan SDM, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, serta peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia.
- b. Kebijakan peningkatan daya saing dioperasionalkan melalui upaya peningkatan produksi dan produktivitas, efisiensi, kualitas, dan promosi perkebunan.
- c. Kebijakan insentif dioperasionalkan melalui upaya penghilangan kebijaksanaan ekonomi biaya tinggi yang diharapkan dapat ditunjang dengan kebijaksanaan fiskal dan moneter seperti pajak, pajak impor dan skim kredit yang kondusif bagi usaha pengembangan perkebunan.
- d. Kebijakan investasi sekaligus mengupayakan regionalisasi, penataan kembali kepemilikan/ penguasaan lahan/ HGU Terutama dalam hal pengeluaran ijin investasi khususnya ijin usaha perkebunan memedomani peraturan yang saat ini berlaku yaitu, Peraturan Menteri Pertanian dalam hal ini Permentan 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha sehingga akan meminimalisir HGU terlantar,

Gangguan Usaha Perkebunan. Selanjutnya, kebijakan ini termasuk pula untuk melaksanakan optimasi lahan, keselarasan peruntukan ruang wilayah provinsi dan kabupaten pada usaha perkebunan skala besar, pemanfaatan IPTEK hasil dari LITBANG, diversifikasi usaha/tanaman dan jaminan keamanan berusaha.

- e. Kebijakan restrukturisasi dan renovasi kelembagaan dioperasionalkan melalui upaya pembentukan lembaga keuangan alternatif, restrukturisasi, renovasi dan pengembangan lembaga penyuluhan, lembaga petani, pemasaran, kelembagaan usaha dan pengembangan jejaring kerja seperti *Cooperative Commodity Development Centre (CCDC)* yang perlu segera dikembangkan di Provinsi Banten.

Kebijakan pembangunan wilayah pada hakekatnya merupakan strategi kerangka perwilayahan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka panjang wilayah Provinsi Banten. Kebijakan ini penting dalam memadukan kebijakan diberbagai bidang dan sektor pembangunan kedalam lingkup kehidupan dan penghidupan wilayah yang beraneka ragam, baik potensi maupun permasalahannya. Kebijakan bidang/sektoral sepatutnya dilengkapi dengan kebijakan perwilayahan, terutama dalam menjamin keserasian laju perkembangan dan pertumbuhan antar daerah, serta memelihara keseimbangan dan kesinambungan pelaksanaan secara menyeluruh terarah dan terpadu. Pada akhirnya mampu mewujudkan penyebarluasan pembangunan dan hasilnya keseluruh wilayah Provinsi Banten.

Kebijakan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) Provinsi Banten tercermin kedalam :

1. Penetapan Wilayah Kerja Pembangunan, dimana digariskan ketentuan penataan wilayah kerja pembangunan.
2. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, antara lain mencakup kebijakan kewilayahan/keruangan mengenai :
 - a. Arahan pengelolaan kawasan budidaya dan kawasan lindung.
 - b. Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan kawasan tertentu.

- c. Arahan pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya.
- d. Arahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan.
- e. Arahan pengembangan prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan pengelolaan lingkungan.
- f. Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan.
- g. Arahan kebijakan tata guna lahan, tata guna air, dan tata guna sumberdaya alam lainnya yang memperhatikan keterpaduan dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

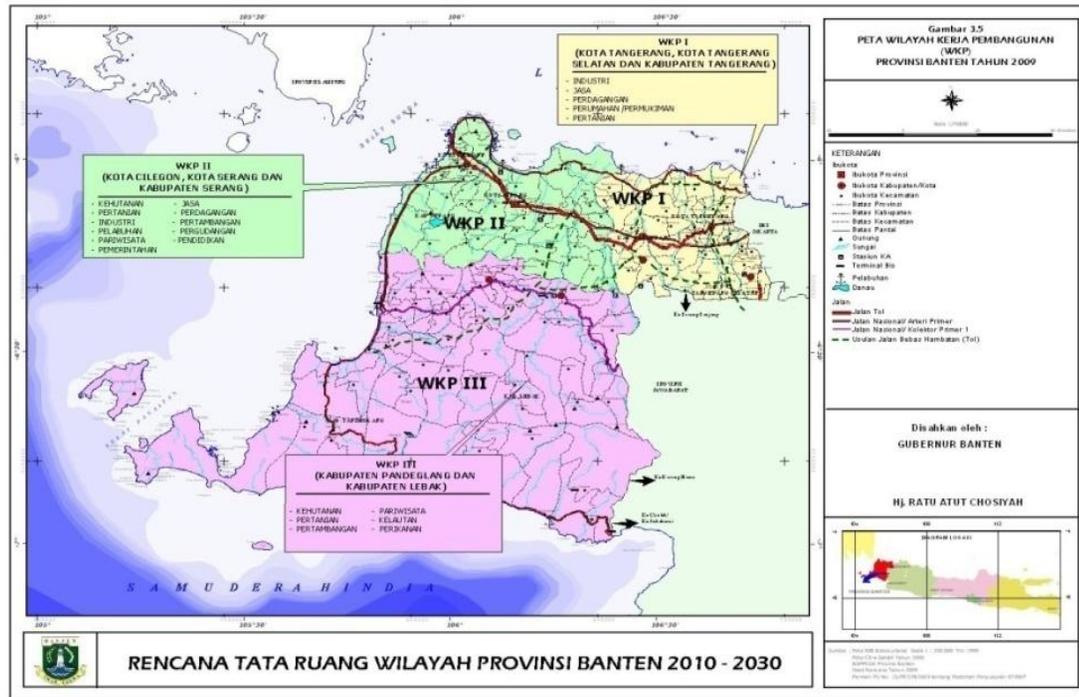
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam pembagian wilayah Provinsi Banten dibagi dalam tiga Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) yang meliputi :

1. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I, meliputi : Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang dengan kegiatan utamanya industri, perdagangan, jasa, dan permukiman.
2. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II, meliputi : Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan kegiatan utamanya pariwisata, pertanian, pertambangan, industri, kehutanan dan pendidikan.
3. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III, meliputi : Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dengan kegiatan utamanya pariwisata, pertanian, pertambangan, kehutanan dan pendidikan.

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ditujukan pada Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui penerapan :

1. Peraturan Zonasi
 - a. Pembagian zonasi
 - b. Ketentuan intensitas penggunaan lahan
 - c. Ketentuan aktivitas yang diijinkan, dilarang dan bersyarat

Gambar 3.1



2. Perizinan

Peraturan zonasi pada tingkat advis planning dan rekomendasi perijinan

3. Pemberian Insentif dan Disinsentif,

- a. Memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
- b. Perpajakan, fiskal, penyediaan infrastruktur, penghargaan.

4. Pengenaan Sanksi

- a. Memberikan efek jera dan pemulihan terhadap kerusakan yang ditimbulkan akibat pelanggaran tata ruang;
- b. Berupa: sanksi administrasi, pidana, perdata.

Pengendalian ini dimaksudkan untuk mewujudkan ruang wilayah Banten sebagai pintu gerbang simpul penyebaran primer nasional-internasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan mendukung ketahanan pangan, industri, dan pariwisata dengan salah satu harapan dapat terwujud Pengembangan kawasan strategis.

Rencana pola ruang untuk kawasan budidaya pada kawasan peruntukan perkebunan berupa pendekatan kawasan komoditas yang meliputi kegiatan budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran

hasil, kelembagaan, dukungan sub sistem, pembiayaan yang merupakan rencana untuk mendukung pembangunan perkebunan berbasis sinergitas ekonomi dan sosial, budaya dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kawasan perkebunan.

Kebijakan wilayah pembangunan subsektor perkebunan harus dapat mengakomodir dan mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan, untuk peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Strategi Khusus

Rencana pembangunan perkebunan dirancang dengan mempertimbangkan pada indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan sumberdaya perkebunan menjadi barang jasa nyata dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten dan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu mengelola kekuatan, kendala, peluang dan tantangan.

1. Kekuatan (*strength*)

Beberapa kekuatan yang bisa didayagunakan antara lain :

- a. Kebijakan ruang wilayah kerja pembangunan mendukung kebun.
- b. Tersedianya potensi klon/ varietas unggulan komoditas perkebunan
- c. Tersedianya potensi sentra komoditas/ kawasan komoditas.
- d. Eksistensi institusi, penyelenggara/ pengelola perkebunan
- e. Potensi lahan dan komoditas unggulan sebagai daya tarik investasi
- f. Keberadaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

5. Kelemahan (*weakness*)

- a. Rendahnya akurasi konsep perwilayahan komoditas yang berkelanjutan

- b. Produksi, produktivitas dan mutu komoditas perkebunan rendah
 - c. Terbatasnya sarana prasarana pendukung sentra dan kawasan komoditas perkebunan
 - d. Usaha perkebunan belum sesuai dengan kondisi agroekosistemnya.
 - e. Potensi lahan / HGU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemajuan usaha dan kesejahteraan masyarakat
 - f. Terbatasnya kuantitas maupun kualitas SDM perkebunan
6. Peluang (*opportunity*)
- Peluang-peluang yang perlu dimanfaatkan adalah :
- a. Potensi sumberdaya perkebunan yang cukup besar.
 - b. Animo masyarakat untuk menanam tanaman perkebunan cukup tinggi
 - c. Tingginya permintaan pasar terhadap hasil perkebunan
 - d. Peluang investasi pada hulu melalui perluasan tanaman dan rehabilitasi, peremajaan tanaman
 - e. Minat investor sektor perkebunan cenderung meningkat
 - f. Potensi perkebunan rakyat cukup tinggi
7. Ancaman (*Threat*)
- Ancaman yang perlu diperhatikan antara lain :
- a. Banyaknya areal perkebunan yang terlantar dan kurang produktif;
 - b. Kesadaran masyarakat menggunakan benih unggul masih rendah;
 - c. Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Gangguan Usaha Perkebunan masih terjadi;
 - d. Penguasaan lahan oleh petani relatif kecil tidak memenuhi skala ekonomi;
 - e. Laju alih fungsi lahan masih cukup tinggi; dan
 - f. Belum mantabnya kelembagaan dan keberdayaan ekonomi masyarakat perkebunan.

5. Sintesis Hasil Analisa

a. Strategi memakai Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang

- 1) Pembangunan perkebunan pada ruang wilayah sesuai dengan peruntukaan perkebunan untuk mengoptimalkan sumberdaya perkebunan.
- 2) Pengembangan klon/ varietas unggul untuk mendukung pembangunan perkebunan rakyat
- 3) Pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas guna memberikan peluang dan akses pasar yang lebih baik.
- 4) Meningkatkan pembinaan dan pengawalan pada usaha perkebunan dan kemitraan dengan masyarakat
- 5) Menciptakan iklim usaha dan investasi yang baik untuk pengembangan komoditas unggulan Provinsi Banten
- 6) Mengembangkan kebersamaan ekonomi untuk membangun kelembagaan tani yang kuat dan mandiri

b. Strategi menanggulangi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang

- 1) Pengembangan perkebunan pada pewilayahan komoditas sesuai ruang wilayah untuk mengoptimalkan potensi perkebunan
- 2) Meningkatkan produktivitas dan mutu komoditas perkebunan untuk memenuhi tingginya permintaan pasar terhadap hasil perkebunan.
- 3) Penyediaan prasarana dan sarana perkebunan rakyat untuk mendukung pengembangan sentra perkebunan kearah kawasan komoditas.
- 4) Mengarahkan pengembangan agribisnis sesuai agroekosistem duna mendukung iklim investasi pada bidang perkebunan
- 5) Pengelolaan HGU mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kemitraan dengan perusahaan untuk perluasan, rehabilitasi, peremajaan
- 6) Peningkatan kapasitas dan jumlah SDM untuk memberikan peluang terhadap animo masyarakat menanam perkebunan.

- c. Strategi memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
- 1) Meningkatkan peran aktif kelompok tani untuk mengoptimalkan lahan yang kurang produktif melalui kemitraan usaha agribisnis perkebunan
 - 2) Meningkatkan peran institusi perkebunan dalam penyediaan benih unggul bermutu
 - 3) Pemanfaatan varietas unggul dan penggunaan benih unggul sebagai bagian pengendalian hama secara terpadu dan pembinaan pengendalian gangguan usaha perkebunan.
 - 4) Optimasi lahan dan pemeliharaan tanaman dengan pengembangan komoditas sesuai sentranya
 - 5) Mempedomani kebijakan ruang wilayah untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan
 - 6) Mengoptimalkan kelembagaan masyarakat petani dalam mengelola potensi lahan dan komoditas untuk meraih peluang inventasi perkebunan
- d. Strategi memperkecil kelemahan dan mengatasi ancaman.
- 1) Pengembangan perkebunan sesuai kawaasan untuk pembangunan perkebunan berkelanjutan
 - 2) Penggunaan bibit bersertifikat untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan
 - 3) Peningkatan prasarana dan sarana agroekosistem untuk Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan mempertimbangkan kejjmitraann dengan masyarakat untuk pengendalian gangguan usaha perkebunan
 - 4) Penyediaan prasarana dan sarana untuk mendorong pemanfaatan lahan yang relatif kecil kedalam sentra komoditas perkebunan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani pekebun
 - 5) Revitalisasi Hak Guna Usaha dan pembinaan usaha perkebunan dalam rangka pemanfaatan lahan dengan kerjasama kemitraan masyarakat

- 6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan lahan, komoditas untuk penumbuhan ekonomi perdesaan

TABEL 3.3 ANALISA SWOT DALAM RENCANA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI BANTEN 2013

EKSTERNAL / INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
		1 Kebijakan ruang wilayah kerja pembangunan mendukung perkebunan 2 Tersedia potensi klon/ varietas unggulan komoditas perkebunan 3 Tersedia Potensi sentra komoditas/ kawasan komoditas perkebunan 4 Eksistensi institusi, penyelenggara/ pengelola perkebunan dari Pemerintah, Perusahaan Perkebunan, Perkebunan Rakyat 5 Potensi lahan dan komoditas unggulan sebagai daya tarik investasi 6 Keberadaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani perkebunan
PELUANG (OPPORTUNITY)	STRATEGI (SO) Memanfaatkan Kekuatan untuk meraih Kesempatan	STRATEGI (WO) Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan peluang
1 Potensi sumberdaya perkebunan yang cukup besar.	1 Pembangunan perkebunan pada ruang wilayah sesuai dengan peruntukaan perkebunan untuk mengoptimalkan sumberdaya perkebunan	1 Pengembangan perkebunan pada pewilayahan komoditas sesuai ruang wilayah untuk mengoptimalkan potensi perkebunan
2 Animo masyarakat untuk menanam tanaman perkebunan cukup tinggi	2 Pengembangan klon/ varietas unggul untuk mendukung pembangunan perkebunan rakyat	2 Meningkatkan produktivitas dan mutu komoditas perkebunan untuk memenuhi tingginya permintaan pasar terhadap hasil perkebunan
3 Tingginya permintaan pasar terhadap hasil perkebunan	3 Pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas guna memberikan peluang dan akses pasar yang lebih baik.	3 Penyediaan prasarana dan sarana perkebunan rakyat untuk mendukung pengembangan sentra perkebunan kearah kawasan komoditas
4 Peluang investasi pada hulu melalui perluasan tanaman dan rehabilitas, peremajaan tanaman	4 Meningkatkan pembinaan dan pengawalan pada usaha perkebunan dan kemitraan dengan masyarakat	4 Mengarahkan pengembangan agribisnis sesuai egroekosistem duna mendukung iklim investasi pada bidang perkebunan
5 Minat investor sektor perkebunan cenderung meningkat	5 Menciptakan iklim usaha dan investasi yang baik untuk pengembangan kkomoditas unggulan Provinsi Banten	5 Pengelolaan HGU mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kemitraan dengan perusahaan untuk perluasan, rehabilitasi, peremajaan
6 Potensi perkebunan rakyat cukup tinggi	6 Mengembangkan kebersamaan ekonomi untuk membangun kelembagaan tani yang kuat dan mandiri	6 Peningkatan kapasitas dan jumlah SDM untuk memberikan peluang terhadap animo masyarakat menanam perkebunan
ANCAMAN (THREATS)	STRATEGI (ST) Memanfaatkan Kekuatan untuk mengatasi Ancaman	STRATEGI (WT) Memperkecil Kelemahan dan Mengatasi Ancaman
1 Banyaknya areal perkebunan yang terlantar dan kurang produktif	1 Meningkatkan peran aktif kelompok tani untuk mengoptimalkan lahan yang kurang produktif melalui kemitraan usaha agribisnis perkebunan	1 Pengembangan perkebunan sesuai kawaasan untuk pembangunan perkebunan berkelanjutan
2 Kesadaran masyarakat menggunakan benih unggul masih rendah	2 Meningkatkan peran institusi perkebunan dalam penyediaan benih unggul bermutu	2 Penggunaan bibit bersertifikat untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan
3 Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Gangguan Usaha Perkebunan masih terjadi	3 Pemanfaatan varietas unggul dan penggunaan benih unggul sebagai bagian pengendalian hama secara terpadu dan pembinaan pengendalian gangguan usaha perkebunan	3 Peningkatan prasarana dan sarana agroekosistem untuk PHT dengan mempertimbangkan kejjmitraann dengan masyarakat untuk pengendalian gangguan usaha perkebunan
4 Penguasaan lahan petani relatif kecil tidak memenuhi skala ekonomi	4 Optimasi lahan dan pemeliharaan tanaman dengan pengembangan komoditas sesuai bsentranya	4 Penyediaan prasarana dan sarana untuk mendorong pemanfaatan lahan yang relatif kecil kedalam sentra komoditas perkebunan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani pekebun
5 Laju alih fungsi lahan masih cukup tinggi	5 Mepedomani kebijakan ruang wilayah untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan	5 Revitalisasi HGU dan pembinaan usaha perkebunan dalam rangka pemanfaatan lahan dengan kerjasama kemitraan masyarakat
6 Belum mantapnya kelembagaan dan keberdayaan ekonomi masyarakat perkebunan	6 Mengoptimalkan kelembagaan masyarakat petani dalam mengelola potensi lahan dan komjoditas untukn meraih peluang inventasi perkebunan	6 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan lahan, komoditas untuk penumbuhan ekonomi perdesaan

Berdasarkan uraian peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan yang diuraikan di atas maka strategi khusus sub sektor perkebunan secara rinci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Strategi Subsektor Perkebunan Provinsi Banten untuk 5 Tahun Kedepan

Kebijakan	Strategi	Milestone				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pembaharuan Sistem	1. Pembangunan perkebunan pada ruang wilayah sesuai dengan peruntukaan perkebunan untuk mengoptimalkan sumberdaya perkebunan	√	√	√	√	√
	2. Pengembangan klon/ varietas unggul untuk mendukung pembangunan perkebunan rakyat	√	√	√	√	√
	3. Pengembangan kawasan perkebunan berbasis komoditas guna memberikan peluang dan akses pasar yang lebih baik.	√	√	√	√	√
	4. Meningkatkan pembinaan dan pengawalan pada usaha perkebunan dan kemitraan dengan masyarakat	√	√	√	√	√
	8. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang baik untuk pengembangan komoditas unggulan Provinsi Banten	√	√	√	√	√
	9. Mengembangkan kebersamaan ekonomi untuk membangun kelembagaan tani yang kuat dan mandiri	√	√	√	√	√
2. Pemanfaatan dan optimalisasi kawasan perkebunan	1. Pengembangan perkebunan pada pewilayahan komoditas sesuai ruang wilayah untuk mengoptimalkan potensi perkebunan	√	√	√	√	√
	2. Meningkatkan produktivitas dan mutu komoditas perkebunan untuk memenuhi tingginya permintaan pasar terhadap hasil perkebunan	√	√	√	√	√
	3. Penyediaan prasarana dan sarana perkebunan rakyat untuk	√	√	√	√	√

	mendukung pengembangan sentra perkebunan kearah kawasan komoditas					
	4. Mengarahkan pengembangan agribisnis sesuai egroekosistem duna mendukung iklim investasi pada bidang perkebunan	√	√	√	√	√
	5. Pengelolaan HGU mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kemitraan dengan perusahaan untuk perluasan, rehabilitasi, peremajaan	√	√	√	√	√
	6. Peningkatan kapasitas dan jumlah SDM untuk memberikan peluang terhadap animo masyarakat menanam perkebunan	√	√	√	√	√
3. Peningkatan Produksi Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1. Meningkatkan peran aktif kelompok tani untuk mengoptimalkan lahan yang kurang produktif melalui kemitraan usaha agribisnis perkebunan	√	√	√	√	√
	2. Meningkatkan peran institusi perkebunan dalam penyediaan benih unggul bermutu	√	√	√	√	√
	3. Pemanfaatan varietas unggul dan penggunaan benih unggul sebagai bagian pengendalian hama secara terpadu dan pembinaan pengendalian gangguan usaha perkebunan	√	√	√	√	√
	4. Optimasi lahan dan pemeliharaan tanaman dengan pengembangan komoditas sesuai bsentranya	√	√	√	√	√
	5. Mempedomani kebijakan ruang wilayah untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan	√	√	√	√	√
	6. Mengoptimalkan kelembagaan masyarakat petani dalam mengelola potensi lahan dan komjoditas untukn meraih peluang inventasi perkebunan	√	√	√	√	√
4. Peningkatan	1. Pengembangan perkebunan	√	√	√	√	√

efisiensi usaha perkebunan pada wilayah kawasan komoditas	sesuai kawaasan untuk pembangunan perkebunan berkelanjutan					
	2. Penggunaan bibit bersertifikat untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan	√	√	√	√	√
	3. Peningkatan prasarana dan sarana agroekosistem untuk PHT dengan mempertimbangkan kejjmitraann dengan masyarakat untuk pengendalian gangguan usaha perkebunan	√	√	√	√	√
	4. Penyediaan prasarana dan sarana untuk mendorong pemanfaatan lahan yang relatif kecil kedalam sentra komoditas perkebunan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani pekebun	√	√	√	√	√
	5. Revitalisasi HGU dan pembinaan usaha perkebunan dalam rangka pemanfaatan lahan dengan kerjasama kemitraan masyarakat	√	√	√	√	√
	6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan lahan, komoditas untuk penumbuhan ekonomi perdesaan	√	√	√	√	√

Rencana pembangunan perkebunan tidak terlepas dari perencanaan dan pengelolaan wilayah perkebunan. Keterkaitan rencana pembangunan perkebunan dengan perencanaan dan pengelolaan wilayah perkebunan yaitu memiliki tujuan yang sama. Tujuan tersebut yaitu menata unsur-unsur fisik daerah sehingga terbentuk struktur wilayah perkebunan yang optimal sehingga mampu mendukung kegiatan yang ada didalamnya. Rencana pembangunan perkebunan merupakan unsur fungsional dari suatu proses pembangunan secara menyeluruh, memiliki beberapa unsur fungsional : (1) Perencanaan wilayah perkebunan diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. (2) Wilayah perkebunan digunakan sesuai dengan nilai ekonomisnya. (3) Wilayah

perkebunan digunakan sesuai sifat fisiknya. (4) Wilayah perkebunan digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, implementasi rencana perkebunan harus sesuai dengan persyaratan dan prosedur peruntukannya (RTRW dan WKP). Program manajemen terpadu, untuk penataan wilayah perkebunan memerlukan informasi yang tepat dari berbagai sektor yang terkait. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah memerlukan berbagai informasi yang cepat dan handal untuk mengetahui lokasi, fungsi dan potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Analisis potensi wilayah perkebunan merupakan bentuk informasi yang diperlukan untuk mendukung Rencana Pembangunan Perkebunan.

Berkaitan dengan rencana pembangunan perkebunan, pengelolaan kawasan perkebunan kedepan perlu didukung dengan pemantapan pengelolaan, baik dari segi perencanaan maupun kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat perkebunan, sehingga diharapkan kawasan perkebunan dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Membangun kawasan perkebunan dibutuhkan peran serta dan tanggung jawab para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan persamaan pemahaman tentang pengertian dan batasan kawasan perkebunan. Berkaitan dengan uraian di atas rencana pembangunan perkebunan kebijakan umum dan kebijakan khusus serta strateginya secara berjangka per lima tahun dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Kebijakan dan Strategi

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2014 s.d 2018	2019 s.d 2023	2024 s.d 2028	2029 s.d 2033
Kebijakan Umum	Mendorong investasi melalui kemudahan-kemudahan dalam pemberian ijin perkebunan.	√	√	√	√
	Optimalisasi pemanfaatan pengembangan komoditas.	√	√	√	√
	Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan.	√	√	√	√
	Rehabilitas tanaman perkebunan.	√	√	√	√

	Pemantapan pengelolaan kawasan perkebunan dengan perencanaan pengelolaan secara terpadu	√	√	√	√
Kebijakan Khusus	Konsep pengembangan kawasan perkebunan	√	√	√	√
	Pengembangan perkebunan terdiri dari : ➤ Sentra perkebunan ➤ Kawasan perkebunan	√	√	√	√
	Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan perkebunan	√	√	√	√

Upaya memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan Provinsi Banten meliputi karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, cengkeh dan aren. Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan komoditas spesifik dan potensial diwilayahnya, dengan rencana pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana aksi pengembangan komoditas spesifik dan potensial meliputi :
 - a. Mendorong pengembangan komoditas unggulan nasional dan lokal sesuai dengan peluang pasar, karakteristik dan potensi wilayah dengan penerapan teknologi budidaya yang baik.
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan seperti lahan pekarangan, lahan pangan, lahan cadangan dan sisa aset lahan lainnya dengan pengembangan cabang usahatani lain yang sesuai.
 - c. Menumbuh kembangkan kawasan komoditas unggulan berbasis perdesaan dengan pengelolaan dari hulu sampai hilir dalam satu kawasan.
 - d. Mendorong pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan untuk mendukung penumbuhan sentra – sentra kegiatan ekonomi pada wilayah khusus antara lain wilayah perbatasan dan penyangga, wilayah konflik/pasca konflik, wilayah bencana alam serta wilayah pemekaran.
 - e. Mendorong pengembangan aneka produk perkebunan dan upaya peningkatan mutu untuk memperoleh peningkatan nilai tambah. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tanggal 22 September 2006 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009, komoditas binaan Direktorat jenderal Perkebunan berjumlah 127 jenis tanaman. Strategi pengembangan komoditas dilakukan melalui upaya-upaya memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan nasional yang meliputi karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, teh, jambu mete, cengkeh, lada, jarak pagar, tebu, tembakau, kapas, nilam dan kemiri sunan.

2. Rencana aksi dari strategi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan meliputi:
 - a. Mengembangkan budidaya tanaman perkebunan melalui penerapan IPTEK dan intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi yang didukung dengan sistem penyuluhan dan pendampingan yang intensif.
 - b. Pengoptimalkan dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi, dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) serta dukungan manajemen dan teknis lainnya.
 - c. Mendorong pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan pada wilayah perbatasan, pemekaran, penyangga, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan optimalisasi pemanfaatan lahan.
3. Rencana aksi dari strategi peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan akan dilakukan meliputi :
 - a. Meningkatkan pengembangan diversifikasi usaha dengan komoditas bahan pangan di areal perkebunan secara intensif dan berkelanjutan;
 - b. Meningkatkan penyediaan protein hewani melalui integrasi cabang usahatani ternak yang sesuai pada areal perkebunan;
 - c. Mendorong ketersediaan dan keterjangkauan sumber pangan yang berasal dari perkebunan.

Rencana aksi ini dilandasi oleh filosofi dari ketahanan pangan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Ketahanan pangan dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan

pangan bagi rumah tangga yang tercermin dan tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sebagai tindak lanjut dari target utama Kementerian Pertanian yaitu peningkatan diversifikasi pangan yang diindikasikan dari skor PPH (93,3 pada tahun 2014), subsektor perkebunan diamanahkan secara khusus untuk berkontribusi dalam pemenuhan skor PPH tersebut dari komponen minyak, lemak dan gula yang ditargetkan rata-rata 15 point per tahun sampai dengan 2014.

4. Rencana aksi dari strategi investasi usaha perkebunan adalah:
 - a. Memberikan fasilitasi, advokasi dan bimbingan dalam memperoleh kemudahan akses untuk pelaksanaan investasi usaha perkebunan.
 - b. Mendorong pelaksanaan pemanfaatan dana perbankan untuk pengembangan perkebunan terutama untuk usaha kecil dan menengah.
 - c. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, mencakup pengembangan sistem pelayanan prima, jaminan kepastian dan keamanan berusaha.
 - d. Mendorong fasilitasi tersedianya sumber dana dari pengembangan komoditas dan sumber lainnya untuk pengembangan usaha perkebunan.
 - e. Mendorong lembaga penjamin kredit untuk berpartisipasi dalam pembangunan perkebunan.

Rencana aksi ini diarahkan untuk mendorong iklim investasi yang kondusif dalam pengembangan agribisnis perkebunan dan meningkatkan peran serta pekebun, usaha mikro kecil dan menengah, masyarakat dan swasta. Perbankan telah menyediakan kredit program dan kredit komersil untuk investasi di bidang perkebunan. Kredit program untuk petani meliputi kredit ketahanan pangan dan energy (KKP - E), kredit Pengembangan Energi Nabati dan rehabilitasi Perkebunan (KPEN-RP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta kredit komersil lainnya. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK).

5. Rencana aksi dari strategi pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan meliputi :

- a. Mengembangkan system informasi mencakup kemampuan menyusun memperoleh dan menyebarkan informasi yang lengkap mengenai SDM, teknologi, peluang pasar, manajemen, permodalan, usaha perkebunan untuk mendorong dan menumbuhkan minat pelaku usaha petani dan masyarakat; dan
 - b. Meningkatkan jejaring kerja dengan instansi terkait.
6. Rencana aksi dari strategi pengembangan sumberdaya manusia
- Upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia baik petugas, pekebun maupun masyarakat dengan cara :
- a. Petugas:
 - 1) Meningkatkan kualitas moral dan etos kerja petugas termasuk di dalamnya petugas fungsional;
 - 2) Meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun sistem pengawasan yang efektif;
 - 3) Meningkatkan penerapan sistem *recruitment* dan karir yang terprogram serta transparan untuk mewujudkan petugas yang professional; dan
 - 4) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan sikap prakarsa petugas yang proaktif dalam mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan pelaku usaha.
 - b. Sumberdaya manusia pekebun dan masyarakat
 - 1) Meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, kemandirian pekebun dan masyarakat untuk mengoptimalkan usahanya secara berkelanjutan.
 - 2) Memfasilitasi dan mendorong kemampuan pekebun dan masyarakat untuk dapat mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya dalam memperkuat/mempertanggung usaha taninya.
 - 3) Menumbuhkan kebersamaan, mengembangkan kemampuan dan keterampilan pekebun dan masyarakat dalam mengelola kelembagaan petani dan kelembagaan usaha serta menjalin kemitraan.

Rencana aksi ini diarahkan untuk mendukung berlangsungnya proses perubahan guna terwujudnya sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha perkebunan.

7. Rencana aksi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Usaha yang akan ditempuh adalah :

- a. Mendorong peningkatan kemampuan dan kemandirian kelembagaan petani untuk menjalin kerjasama usaha dengan mitra terkait serta mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya yang tersedia.
- b. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan komoditas yang tumbuh dari bawah.
- c. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan keuangan perdesaan.
- d. Meningkatkan fungsi pendampingan kepada petani dan kelembagaan usahanya.
- e. Memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara petani, pengusaha, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. Disisi lain kalangan usaha dapat berperan dalam memperkuat asosiasi komoditas maupun dewan komoditas perkebunan.

Rencana aksi ini diarahkan pada pengembangan kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelembagaan agribisnis perkebunan dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada. Adapun strategi pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan untuk dapat memperoleh manfaat maksimal dari kegiatan agribisnis perkebunan.

8. Rencana aksi dari strategi pengembangan dukungan terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah :

- a. Meningkatkan penerapan sistem pertanian konservasi pada wilayah perkebunan termasuk lahan kritis, Daerah Aliran Sungai (DAS) hulu dan pengembangan perkebunan di kawasan penyangga sesuai kaidah konservasi tanah dan air;
- b. Meningkatkan penerapan paket teknologi ramah lingkungan;
- c. Meningkatkan pemanfaatan pupuk organik, pestisida nabati, agensi pengendali hayati, serta teknologi pemanfaatan limbah usaha perkebunan yang ramah lingkungan;
- d. Meningkatkan kampanye peran perkebunan dalam kontribusi penyerapan karbon, penyedia oksigen dan peningkatan peran serta fungsi hidro orologis;
- e. Meningkatkan upaya penerapan pembukaan lahan tanpa bakar.

Rencana aksi ini diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya perkebunan secara optimal sesuai dengan daya dukung sehingga kelestariannya dapat tetap terjaga. Melalui strategi ini pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan secara harmonis ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi secara berkelanjutan.

C. Kebijakan Ruang Daerah

Kebijakan Wilayah Kerja Pembangunan pada hakekatnya merupakan strategi kerangkaan perwilayahan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka panjang di wilayah Provinsi Banten. Kebijakan ini penting dalam memadukan kebijakandiberbagai bidang dan sektor pembangunan ke dalam lingkung kehidupan dan penghidupan wilayah yang beranekaragam, baik potensi maupun permasalahannya. Kebijakan bidang/ sektoral sepatutnya dilengkapi dengan kebijakan perwilayahan, terutama dalam menjamin keserasian laju perkembangan dan pertumbuhan antar daerah, serta memelihara keseimbangan dan kesinambungan pelaksanaan secara menyeluruh, terarah dan terpadu, yang pada akhirnya mampu mewujudkan penyebarluasan pembangunan dan hasilnya ke seluruh wilayah provinsi Banten.

Kebijakan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) Provinsi Banten tercermin ke dalam :

1. Penetapan Wilayah Kerja Pembangunan, dimana digariskan ketentuan penataan wilayah kerja pembangunan.
2. Penetapan rencana tata ruang wilayah, yang antara lain mencakup kebijaksanaan kewilayahan/keruangan mengenai:
 - a. Arahan pengelolaan kawasan budidaya dan kawasan lindung;
 - g. Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan kawasan tertentu;
 - h. Arahan pengembangan kawasan pemukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya;
 - i. Arahan pengembangan sistem pusat pemukiman perdesaan dan perkotaan;
 - j. Arahan pengembangan prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan pengelolaan lingkungan;
 - k. Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan; dan
 - l. Arahan kebijakan tataguna tanah, tata guna air, dan tata guna sumber alam lainnya yang memperhatikan keterpaduan dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Satuan wilayah pengembangan memiliki fungsi : (1) Menciptakan keserasian dan keseimbangan struktur ruang wilayah. (2) Sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah hinterlandnya, diharapkan mampu sebagai motor penggerak pembangunan. (3) Sebagai motor penggerak perekonomian wilayah. (4) Sebagai stimulator bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian wilayah. Satuan wilayah pengembangan diharapkan dapat berperan secara efektif untuk : (1) Menciptakan keserasian dan keterpaduan struktur ruang secara berhirarkhi dari tingkat pelayanan lokal, regional dan nasional. (2) Mendukung strategi kebijakan keruangan dalam pembangunan wilayah Banten. Mendukung rencana struktur ruang wilayah Banten yang tidak terpisahkan dari struktur tata ruang wilayah nasional dan struktur tata ruang Kabupaten/Kota.

D. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten

Berdasarkan RTRW Banten kawasan-kawasan yang tidak termasuk ke dalam kriteria kawasan lindung sebagaimana Keppres No.32/1990 dapat diarahkan sebagai kawasan budidaya, dengan tetap memperhatikan klasifikasi kesesuaian lahannya berdasarkan faktor ketinggian, kemiringan/sudut lereng, keadaan hidrologi.

Acuan yang dipakai dalam penetapan kawasan budidaya ini akan meliputi:

1. Penggunaan lahan, yang menjadi masukan penting untuk mengindikasikan bentuk pola ruang budidaya yang ada; dalam hal ini fungsi yang diletakkan pada suatu kawasan didasarkan pada fungsi dominan/utama dalam kawasan tersebut;
2. Kajian mengenai kecenderungan atau trend perkembangan fungsi-fungsi dan bentuk-bentuk pemanfaatan dalam kawasan;
3. Kajian kesesuaian fungsi atau bentuk pemanfaatan dalam ruang, seperti kesesuaian lahan untuk kawasan budidaya pertanian, posisi lokasi relatif terhadap kegiatan atau fungsi lainnya, penguasaan lahan dan berbagai pertimbangan lainnya;
4. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. Kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dalam proses perencanaan antar berbagai pemangku kepentingan sebagai bentuk perencanaan partisipatif.

Atas dasar itu kemudian dapat diindikasikan skenario pengembangan kawasan budidaya tersebut pada masa datang.

Berdasarkan data saat ini yang ada, maka secara keseluruhan pola ruang di Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Luas kawasan lindung mencapai 203.426,80 Ha atau 23,51 % dari luas wilayah Provinsi Banten, dengan rincian berikut:

- a. Kawasan Lindung Nasional
 - 1) CA Rawa Danau : 2.500,00 Ha (0,29 %)
 - 2) CA G. Tukung Gede : 1.700,00 Ha (0,20 %)
 - 3) TWA Pulang Sangiang : 528,15 Ha (0,06 %)
 - 4) TN Ujung Kulon (TNUK) : 78.619,00 Ha (9,09 %)
 - 5)TN Halimun Salak : 16.380,00 Ha (1,89 %)
- b. Kawasan Lindung Provinsi
 - 1) CA Pulau Dua : 30,00 Ha (0,003 %)
 - 2) TWA Carita : 95,00 Ha (0,011 %)
 - 3) Hutan Lindung : 36.016,54 Ha (4,16 %)
 - 4)Sempadan Danau/Situ : 3.798,09 Ha (0,44 %)
 - 5) Sempadan Pantai : 5.174,2 Ha (0,60 %)
 - 6)Kawasan rawan bencana alam : 44.785,03 Ha (5,18 %)
 - 7) Kawasan lindung sekitar sumber mata air : 787,43 Ha (0,09 %)
 - 8) Kawasan konservasi cagar budaya : 5.136,58 Ha (0,59 %)
 - 9) Kawasan sempadan sungai : 7.876,79 Ha (0,91 %)
2. Kawasan budidaya seluas 661.693,20 Ha (76,49 %), dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi : 72.292,58 Ha (8,36 %)
 - b. Kawasan peruntukan pertanian : 197.845,11 Ha (22,87 %)
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan : 291.025,73 Ha (33,64 %)
 - d. Kawasan peruntukan industri, pariwisata, dan permukiman : 100.529,78 Ha (11,62 %)

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi : (1) Peningkatan produktivitas kawasan budidaya; (2) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; (3) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Strategi pengembangan kawasan budidaya berupa peningkatan produktivitas kawasan budidaya, meliputi: (1) Memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya; (2) Meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian dengan

usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian; (3) Mewujudkan kawasan budidaya melalui pengembangan hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya secara produktif melalui pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan perdesaan.

Strategi pengembangan kawasan budidaya berupa perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi: (1) Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat; (2) Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan; (4) Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; (5) Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut kewenangan Provinsi Banten.

Strategi pengembangan kawasan budidaya berupa pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui dayadukung dan daya tampung lingkungan, meliputi: (1) Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; (2) Mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut; (4) Mengembangkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota; (5) mengendalikan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;

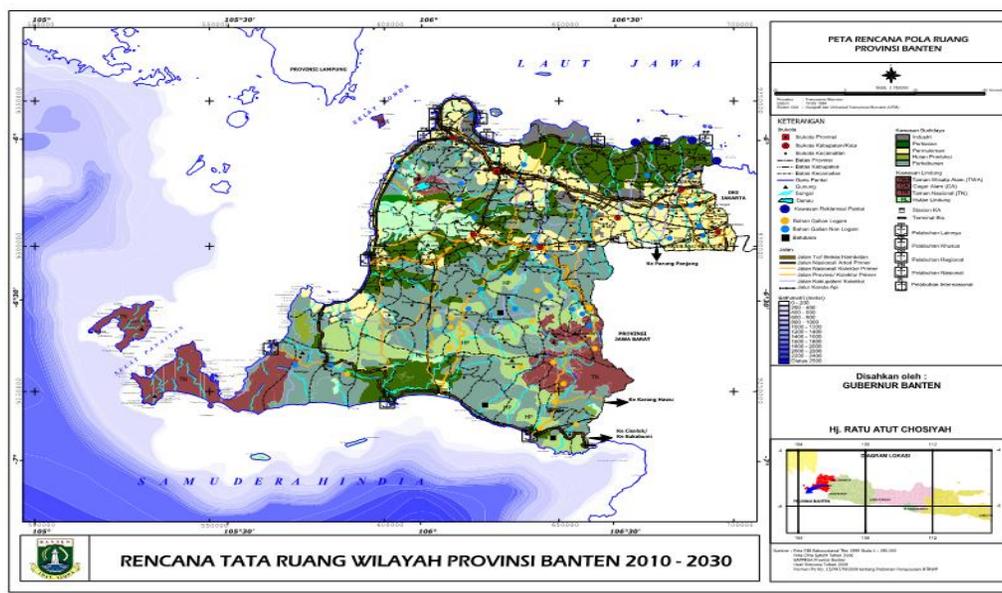
Kawasan budidaya yang dimaksud merupakan arahan peruntukan yang terdiri dari : (1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, (2) Kawasan Peruntukan Pertanian. (3) Kawasan Peruntukan Perkebunan. (4) Kawasan Peruntukan Perikanan (5) Kawasan Peruntukan Pertambangan (6) Kawasan Peruntukan Industri (7) Kawasan Peruntukan Pariwisata dan (8) Kawasan Peruntukan Permukiman.

Selain kawasan peruntukan tersebut di atas, di Wilayah Provinsi Banten juga terdapat Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional yaitu Kawasan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Selain itu diarahkan pula pengembangan Laut Krakatau dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

Adapun rencana pengembangan Kawasan Peruntukkan Perkebunan di wilayah Provinsi Banten tahun meliputi :

- a. Pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam meningkatkan produksi tanaman perkebunan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Kriteria Penetapan
 - 1) Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan tanaman perkebunan.
 - 2) Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan tanaman perkebunan secara ruang dapat memberikan manfaat:
 - a) Meningkatkan produksi tanaman perkebunan dan pendayagunaan investasi yang adil ;
 - b) Meningkatkan perkembangan sektor dan kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - c) Meningkatkan fungsi lindung dan konservasi;
 - d) Upaya pelestarian sumber daya untuk pangan ;
 - e) Meningkatkan pendapatan masyarakat ;
 - f) Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional ;
 - g) Meningkatkan kesempatan kerja ;
 - h) Meningkatkan ekspor ;

- i) Meningkatkan perkembangan masyarakat.
- c. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan :
 - 1) Pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, dan diluar area rawan banjir serta longsor.
 - 2) Penetapan komoditi tanaman berpotensi unggulan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi.
 - 3) Peningkatan peruntukan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan Industri Masyarakat Perkebunan



Gambar 3.2. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Banten

- 4) Perubahan fungsi lahan kawasan perkebunan dapat dilakukan melalui mekanisme penilaian biaya dan manfaat ditinjau dari aspek fisik, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan.
- 5) Kawasan peruntukan perkebunan diarahkan di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon dengan komoditas unggulan Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kopi, Cengkeh dan aren.

E. Wilayah Pembangunan Perkebunan

Kawasan pengembangan perkebunan adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan yang disatukan oleh faktor alamiah, kegiatan ekonomi, sosial budaya dan dibatasi oleh agroekosistem yang sama sehingga tercapai skala ekonomi. Kawasan perkebunan dapat berupa kawasan yang telah ada maupun lokasi baru. Secara fungsional baik dari faktor sumberdaya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah.

Kawasan tersebut pada hakekatnya merupakan gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait. Berdasarkan tingkat perkembangannya, proses pengembangan kawasan melalui beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Tahap Inisiasi

Pada tahap inisiasi kegiatan dilakukan lebih bersifat administratif, diawali dengan penetapan komoditas dan calon lokasi dengan berbagai pendekatan. Kegiatan selanjutnya adalah dengan melakukan pengumpulan data dan informasi detail kawasan mencakup potensi biofisik dan sosial-ekonomi yang mendukung pengembangan komoditas yang akan dikembangkan. Data dan informasi tersebut ditindaklanjuti dengan menyusun master plan/dokumen perencanaan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan rencana aksi oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang menjelaskan

mengenai kondisi ideal kawasan ke depan serta langkah-langkah yang diperlukan untuk menuju ke kondisi yang diharapkan. Indikator keberhasilan pada tahap inisiasi meliputi: (1) ditetapkannya kawasan pertanian berdasarkan potensi sumberdaya lahan, (2) tersusunnya master plan dan rencana aksi pengembangan kawasan pertanian, (3) terbitnya dokumen kesepakatan kerjasama lintas sektoral pengembangan kawasan pertanian (MoU), dan (4) tersedianya anggaran (non APBN Kementan) untuk pengembangan kawasan perkebunan.

Kegiatan pada tahap inisiasi terdiri dari: (1) pembentukan organisasi pelaksana (2) Penetapan komoditas dan calon lokasi kawasan (3) Pengumpulan data dan informasi detail kawasan, rekomendasi strategi penggabungan sentra-sentra potensial terpisah menjadi satu kesatuan kawasan (4) Diagnosa dan studi terhadap potensi kawasan (5) menyusun master plan dan rencana aksi/*road map* pengembangan kawasan.

2. Tahap Penumbuhan

Penumbuhan kawasan dilaksanakan pada kawasan saat ini yang belum berkembang dengan titik berat pengembangan pada kegiatan *on farm*, penerapan teknologi budidaya, penyediaan sarana dan prasana pertanian, penguatan kegiatan, penyuluhan pertanian.

Tahap penumbuhan kawasan dapat juga merupakan tindak lanjut dari kegiatan tahap inisiasi, yaitu berupa pelaksanaan rencana aksi dengan titik berat seperti tersebut di atas.

Bagi lokasi-lokasi saat ini yang belum mempunyai data dan informasi kawasan serta belum mempunyai *master plan* dan rencana aksi maka pada tahap ini diprioritaskan secara parallel menyusun hal-hal tersebut.

3. Tahap Pengembangan

Pengembangan kawasan dilaksanakan pada kondisi yang telah cukup berkembang dengan titik berat pengembangan *on farm*, kelembagaan tani, penyediaan sarana dan prasarana, penyuluhan. Bagi lokasi-lokasi pengembangan kawasan yang mempunyai data dan informasi kawasan serta belum mempunyai

master plan, maka diprioritaskan secara paralel penyusunan hal-hal tersebut. Disamping itu juga dilaksanakan penguatan keterkaitan antar sentra pertanian (pengembangan jejaring kerja) agar terbentuk kawasan pertanian secara utuh.

4. Tahap Pemanfaatan dan Pengembangan

Tahap pemantapan kawasan dilaksanakan pada kawasan yang telah berkembang dengan titik berat pengembangan pada penguatan kelembagaan, peningkatan mutu, penguatan akses pemasaran, pengembangan pascapanen, pengembangan olahan. Di dalam pemantapan kawasan termasuk didalamnya kegiatan pengutuhan kawasan untuk lebih mengoptimalkan potensi kawasan melalui kegiatan perluasan di dalam kawasan.

Sentra perkebunan merupakan bagian dari kawasan perkebunan yang memiliki ciri tertentu dimana didalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk pertanian unggulan. Sentra perkebunan merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komoditas dalam kegiatan ekonomi yang telah membudaya yang ditunjang oleh prasarana dan sarana produksi untuk berkembangnya produk tersebut. Pada area sentra perkebunan terdapat suatu kesatuan fungsional secara fisik lahan, geografis, agroklimat, infrastruktur dan kelembagaan serta SDM, yang berpotensi untuk berkembangnya suatu komoditas unggulan.

Kawasan Perkebunan Merupakan gabungan dari sentra-sentra perkebunan yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumberdaya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah.

Kawasan perkebunan provinsi merupakan kawasan perkebunan yang telah ditetapkan oleh gubernur dengan kriteria : (1) memiliki kontribusi yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap pembentukan produksi provinsi (2) difasilitasi oleh APBD Provinsi dan/atau dapat didukung APBN sebagai pendamping (untuk provinsi yang mengembangkan 40 komoditas unggulan nasional) (3) mengembangkan komoditas unggulan provinsi dan/atau 40 komoditas unggulan nasional.

Kawasan perkebunan Kabupaten/Kota merupakan kawasan yang ditetapkan oleh bupati/walikota dengan kriteria : (1) memiliki kontribusi produksi yang signifikan atau berpotensi oleh produksi Kabupaten/Kota, (2) difasilitasi oleh APBD kabupaten/ kota dan atau didukung oleh APBN sebagai pendamping (untuk kabupaten yang mengembangkan 40 komoditas unggulan nasional), serta dapat didukung oleh APBD provinsi (untuk kabupaten yang mengembangkan 40 komoditas unggulan provinsi) (3) mengembangkan komoditas unggulan Kabupaten/Kota, komoditas unggulan Provinsi dan/atau komoditas 40 unggulan nasional.

5. Tahap Integrasi Antar Kawasan

Pada tahap ini, kawasan-kawasan yang telah mantap dibangun keterkaitan dengan kawasan lainnya, sehingga terbentuk hubungan antar kawasan yang merupakan jejaring antar kawasan. Pada tahap integrasi antar kawasan lebih ditekankan pada pengembangan inovasi teknologi, penguatan kelembagaan peningkatan koordinasi, dengan berbagai pemangku kepentingan, dan penguatan kerjasama pemasaran.

F. Implementasi Program dan Sasaran Kegiatan Wilayah Pembangunan Perkebunan

1. Implementasi Program

Implementasi Program Perkebunan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Peningkatan ketahanan pangan kegiatannya adalah tumpang sari pada areal kebun
- b. Pengembangan agribisnis indikasi kegiatannya;
 - 1) Pengembangan dan rehabilitasi tanaman komoditas unggulan
 - 2) Pengembangan, penggunaan dan pemanfaatan benih unggul;
 - 3) Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan
 - 4) Pengolahan kaji terapan teknologi; dan
 - 5) Pengembangan pemasaran hasil perkebunan.
- c. Peningkatan kesejahteraan petani, indikasi kegiatannya :

- 1) pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarkawasan;
 - 2) pengembangan kemitraan; dan
 - 3) pemberdayaan kelompok tani.
- d. Bimbingan kelompok usaha perkebunan rakyat indikasi kegiatannya adalah :
- 1) Penyusunan program pembangunan perkebunan;
 - 2) Peningkatan dan pengembangan desa model binaan program pembangunan perkebunan;
 - 3) Pengembangan sistim informasi dan pendataan pembangunan perkebunan; dan
 - 4) Peningkatan kerjasama antar daerah.
- e. Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah, indikasi kegiatannya adalah peningkatan kerjasama pemerintah dan pembangunan antar pemerintah;
- f. Peningkatan disiplin aparatur, indikasi kegiatannya adalah pembinaan pegawai;
- g. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, indikasi kegiatannya adalah sosialisasi peraturan perundang – undangan;
- h. Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, indikasi kegiatannya :
- 1) Pengembangan kegiatan bina gemar menanam perkebunan;
 - 2) Pencegahan dan penanggulangan Gangguan usaha perkebunan dan kebakaran kebun;
 - 3) Pelestarian plasma nutfah; dan
 - 4) Identifikasi potensi varietas spesifik geografis.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan yang akan dicapai :

- a) Pengembangan agribisnis, dengan sasaran meningkatnya produksi semua komoditas perkebunan termasuk 7 komoditas unggulan dengan kenaikan per tahun 7 %.
- b) Perencanaan, pengembangan dan pengendalian kegiatan pembangunan, dengan sasaran tersusunnya dan terkendalinya rencana pembangunan perkebunan sesuai arah dan kebijakan.

- c) Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah, sasarannya adalah terselenggaranya kerjasama pembangunan antar provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar provinsi dengan provinsi.
- d) Pelayanan administrasi perkantoran, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi.
- e) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, sasaran dari program ini adalah meningkatnya profesionalisme aparatur.
- f) Peningkatan disiplin aparatur, sasarannya adalah meningkatnya disiplin aparatur.
- g) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, sasaran dari program ini adalah meningkatnya profesionalisme aparatur.

Memperhatikan masalah, tantangan, potensi dan peluang yang ada, maka pembangunan perkebunan di Provinsi Banten untuk memperoleh hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing perkebunan.
2. Meningkatkan kemampuan SDM perkebunan.
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan.
4. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan devisa dari subsektor perkebunan.
5. Menyediakan lapangan kerja.
6. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industry dalam negeri.
7. Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan.
8. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah, mendukung pengembangan bio energy.

BAB IV

PROYEKSI PROSPEK DAN ARAH PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

A. Proyeksi Prospek Komoditas Unggulan Perkebunan Provinsi Banten

Globalisasi dalam perdagangan dunia akan menjadikan sistem pemasaran menjadi lebih transparan sehingga persaingan menjadi lebih ketat. Agar tetap bertahan dan berhasil menghadapi persaingan yang semakin ketat tersebut maka masyarakat perkebunan dituntut untuk dapat meningkatkan daya saing produk-produknya. Pasar bebas yang diciptakan oleh perjanjian perdagangan pertanian hanya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh suatu daerah atau negara yang dalam proses produksinya efisien dan dapat memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimilikinya menjadi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu dalam menghadapi liberalisasi perdagangan dituntut untuk dapat mempercepat peningkatan daya saing, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan mutu hasil produk.

Dari sisi permintaan pasar, telah terjadi perubahan nilai yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk pertanian, termasuk perkebunan antara lain meliputi :

1. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya kesehatan dan kebugaran yang berhubungan dengan pola makan, akan menimbulkan tuntutan terhadap produk alami yang memiliki kandungan nutrisi sehat untuk dikonsumsi, aman tanpa menimbulkan efek samping dan menunjang kebugaran.
2. Perubahan gaya hidup masyarakat telah merubah pola dan gaya konsumsi terhadap produk hasil pertanian, tidak hanya berdasarkan dimensi fisiologis, namun juga memperhatikan dimensi psikologis, estetis, dan kenyamanan. Hal ini akan mendorong adanya peningkatan terhadap keragaman produk, keindahan penampilan dan keragaman kepuasan.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat internasional akan kelestarian lingkungan hidup yang terkait dengan mutu kehidupan dan kesejahteraan manusia, telah mendorong dipertimbangkannya

aspek kelestarian lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

4. Berkembangnya tuntutan masyarakat internasional akan hak-hak asasi manusia sebagai suatu nilai keadilan bersama telah mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi dalam perdagangan dunia.

Perubahan tersebut diatas membawa konsekuensi pada semakin rasionalnya konsumen, sehingga konsumen menghendaki produk yang memenuhi standar kesehatan, terpenuhinya nutrisi, meningkatnya permintaan produk dengan nilai yang kompetitif, kemasan yang menarik dan aman, produk yang ramah lingkungan dan proses produksi yang manusiawi. Sebagian dari tuntutan konsumen tersebut telah dipenuhi melalui penerapan *Sanitary and Phytosanitary (SPS)*, serta penerapan standar mutu, sehingga sosialisasi, pembinaan dan monitoringnya harus ditingkatkan.

Jika dilihat dari sisi penawaran, kemampuan bersaing yang berkaitan dengan kemampuan merespons perubahan perilaku konsumen harus dilakukan secara cepat dan efisien. Kemampuan merespons tersebut menyangkut dua hal, yaitu : adanya integrasi vertikal dari hulu sampai hilir dalam sistem agribisnis dan menjadikan berbagai sumberdaya (lahan, air, manusia, modal dan teknologi) sebagai sumber peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang sekaligus menjadi kekuatan dalam merespons perubahan pasar.

Tuntutan pasar terhadap produk pertanian termasuk produk perkebunan mempunyai jaminan mutu dan memperhatikan kaidah kesehatan, sehingga produk tersebut akan laku di pasar. Untuk menghasilkan produk yang mampu memenuhi permintaan pasar tersebut, pelaku agribisnis perkebunan harus menerapkan jaminan mutu, seperti penerapan standar internasional (ISO) maupun HCCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) untuk produk yang diperdagangkan antar negara, dan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk yang diperdagangkan di dalam negeri. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah adanya produk substitusi yang berkembang sejalan dengan semakin mahalnya bahan produk alami, majunya teknologi dan permintaan pasar. Produk substitusi yang berupa produk sintetis misalnya karet, kapas, minyak nabati.

B. Analisis Kelayakan Usaha dan Pendapatan Usaha dalam Pengembangan Produk Pada Berbagai Skala Usaha

Subsektor perkebunan sangat berpotensi untuk dikembangkan dalam menunjang industri pengolahan hasil pertanian, pengembangan sumber energi terbarukan dan agrowisata, sehingga adanya investasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kegiatan produksi pada subsektor perkebunan yang telah dilaksanakan oleh pelaku agribisnis perkebunan baik perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta (PBS) maupun perkebunan besar negara (PTPN) merupakan keputusan yang menguntungkan.

Pengembangan subsektor perkebunan melalui pendekatan dan pengembangan investasi diharapkan akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada saatnya nanti akan memberikan nilai tambah dan efek ganda yang positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten dan akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan.

Beberapa keuntungan yang akan diperoleh dengan adanya pengembangan subsektor perkebunan melalui pendekatan dan pengembangan investasi antara lain:

1. menyediakan lapangan kerja;
2. memanfaatkan sumberdaya alam;
3. meningkatkan pendapatan petani; dan
4. meningkatkan pendapatan daerah/devisa negara dan dapat dijadikan sebagai wahana pembangunan daerah.

Pembangunan perkebunan akan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi daerah jika dilakukan dengan mempertimbangkan kecocokan ekologis maupun peluang untuk memanfaatkan permodalan dan sumberdaya alam yang tersedia, serta ketrampilan teknis dan manajerial sumberdaya manusia di daerah. Menilik kemampuan dari ketiga kelompok pengelola perkebunan

(Perkebunan Rakyat, Perkebunann Besar Swasta maupun Perkebunan Besar Negara), makaprioritas pengembangan perkebunan di Provinsi Banten lebih ditekankan pada perkebunan rakyat.

Untuk menentukan sebaran lokasi basis komoditas perkebunan di Provinsi Banten, dilakukan dengan analisis *Location Queation* (LQ), Nilai prospektif dan kompetitif produk perkebunan ditentukan berdasarkan hasil analisis *Shift Share* terhadap tujuh komoditas perkebunan di Provinsi Banten, yaitu :

1. Kelapa

Komoditas kelapa di Provinsi Banten dapat diidentifikasi lokasi yang merupakan basis pengembangan yaitu di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang. Adapun lokasi sebarannya pada tabel berikut:

Tabel4.1
Lokasi Basis Komoditas Kelapa

SEBARAN LOKASI BASIS KOMODITI KELAPA		NILAI LQ > 1			
KABUPATEN	KECAMATAN	KOMODITI BASIS SANGAT POTENSIAL	KOMODITI BASIS POTENSIAL	KOMODITI BASIS CUKUP POTENSIAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
SERANG	Bojonegara		3,77		
	Puloampel		3,76		
	Anyer		3,75		
	Ciomas		2,29		
	Baros		3,21		
	Padarincang		3,42		
	Cinangka		2,99		
	Pabuaran		3,10		
	Waringin		3,00		
	kurung				
	Mancak			3,72	
	Cikande			3,84	
	Kibin			3,86	
	Cikeusal			3,68	
	Pamarayan			3,51	
	Kopo			3,60	
	Petir			3,60	
	Kragilan			3,86	
	Jawilan			3,62	
	Tunjungteja			3,65	
	Pontang			3,84	
	Tirtayasa			3,86	
	Tanara			3,86	
	Carenang			3,86	
	Binuang			3,86	
	Kramatwatu			3,71	
Ciruas			3,81		
PANDEGLANG	Pandeglang		2,25		
	Cadasari		2,12		

	Banjar	3,13	
	Kaduhejo	2,77	
	Cimanuk	2,56	
	Cipeucang	2,37	
	Mandalawangi		1,06
	Saketi	2,75	
	Cisata	2,59	
	Bojong	2,85	
	Picung	2,74	
	Munjul	2,05	
	Angsana	2,05	
	Cikeudal		1,59
	Jiput	2,90	
	Labuan	3,48	
	Pagelaran	3,53	
	Patia	3,34	
	Cigeulis	3,42	
	Cimanggu	3,56	
	Cibaliung	3,64	
	Cikeusik	3,14	
	Panimbang	3,15	
	Sumur	3,37	
LEBAK	Rangkasbitung	2,88	
	Cibadak	2,49	
	Warunggunung	3,06	
	Cikulur	2,33	
	Maja		2,00
	Cileles		1,99
	Malingping		1,13
	Wanasalam	3,68	
	Bayah		1,06
	Cilograng		1,32
TANGERANG	Mauk		
	Sepatan		
	Pakuhaji		
	Teluk Naga		

Sumber Masterplan Perkebunan 2007

Fluktuasi luas areal kelapa sebagai akibat dinamika pembangunan dari berbagai aspek, terutama pemukiman dan industri yang memerlukan lahan cukup luas, disamping kebutuhan lainnya. Kelapa yang merupakan tanaman sosial kedua setelah padi, saat ini telah banyak yang tua dan kurang produktif. Kelapa akan sangat dibutuhkan oleh setiap rumah tangga oleh karena itu mempunyai prospek pengembangan yang sangat baik.

Berdasarkan perhitungan *shift share*, lokasi lokasi yang merupakan wilayah unggulan bagi pengembangan komoditi kelapa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Sebaran Lokasi Unggulan Komoditas Kelapa

SEBARAN LOKASI UNGGULAN KOMODITI KELAPA		KRITERIA			INTERPRETASI
KABUPATEN (1)	KECAMATAN (2)	SIR (3)	PIR (4)	DIR (5)	
SERANG	Anyer	+	+	+	SIR (+) menunjukkan komoditi kelapa memiliki potensi pertumbuhan produktivitas lebih cepat dibandingkan dengan komoditi lain. PIR(+) menunjukkan gejala spesialisasi dan lokalisasi pada komoditi kelapa DIR(+) menunjukkan adanya pertumbuhan komoditi kelapa secara cepat akibat factor akses lebih baik ke wilayah pasar atau ke bahan baku.
	Padarincang	+	+	+	
	Cinangka	+	-	+	
	Mancak	+	+	+	
	Kibin	+	-	+	
	Cikeusal	+	+	+	
	Pamarayan	+	+	+	
	Kopo	+	+	+	
	Petir	+	+	+	
	Kragilan	+	+	+	
	Tirtayasa	+	+	-	
	Tanara	+	+	-	
	Carenang	+	+	-	
	Binuang	+	+	-	
Ciruas	+	+	-		
PANDEGLANG	Pandeglang	+	-	+	
	Cadasari	+	-	+	
	Banjar	+	-	+	
	Cipeucang	+	+	-	
	Saketi	+	+	-	
	Cisata	+	+	-	
	Bojong	-	+	+	
	Picung	-	+	+	
	Angsana	-	+	+	
	Labuan	+	-	+	
	Cibaliung	+	-	+	
	Cikeusik	-	+	+	
	Panimbang	+	-	+	
	Rangkasbitung	+	-	+	
LEBAK	Cibadak	+	+	+	
	Cikukur	+	+	+	
	Leuwidamar	+	-	+	
	Muncang	+	-	+	
	Malingping	+	+	-	
	Warunggunung				
	TANGERANG	Mauk			
Sepatan		-	+	+	
Pakuhaji					
Teluknaga					

Sumber : Masterplan Perkebunan 2007

Pada wilayah Kabupaten Tangerang terdapat potensi pertanaman kelapa yang dapat dinamai sebagai Kelapa Eksotik, terdiri dari Kelapa

Kopyor (Puan), Kelapa Lilin. Kelapa Eksotik ini memiliki nilai ekonomi sangat tinggi, sehingga dapat mendukung peningkatan pendapatan petani dan akan dapat menjadi ciri khas dari Provinsi Banten. Untuk menjaga kelestarian sumberdaya genetik dan pemanfaatannya bagi masyarakat, Kelapa Eksotik tersebut perlu dilakukan penyelamatan plasmanutfah dan pengembangannya, sekaligus dapat dimanfaatkan untuk dunia pendidikan dan pariwisata.

Hasil survey di Kabupaten Tangerang ditemukan potensi tanaman kelapa kopyor dengan jumlah yang cukup banyak menyebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Naga, Kecamatan Paku Haji dan Kecamatan Mauk pada lahan yang kompak. Masing-masing kecamatan memiliki karakteristik yang spesifik terkait penyebaran dan pola pengusahaan kelapa kopyor. Selain itu juga ditemukan kelapa eksotik di Kabupaten Serang dan Pandeglang. Hasil pengamatan di desa Sukerena, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang ditemukan kelapa Cungap Merah dengan warna buah hijau dan coklat yang dapat dijadikan sebagai sumber benih.

Berdasarkan potensi kelapa eksotik tersebut dan melaksanakan konservasi maka perlu dibangun kebun induk kelapa eksotik yang dirakit dengan menggunakan benih atau bahan tanaman kelapa kopyor hasil kultur embrio yang berasal dari buah tanaman kelapa kopyor yang tersebar daerah Banten. Tanaman hasil kultur embrio tersebut akan menjadi sumber serbuk sari untuk perakitan bibit kelapa kopyor *True to Type* yang akan dihasilkan dari kebun induk dimaksud.

Dengan demikian, pengembangan kelapa eksotik ini dapat menjaga kelestarian sumberdaya genetik dan penyelamatan plasma nutfah sekaligus dapat dimanfaatkan bagi dunia pendidikan dan dunia pariwisata yang berdampak pada terbukanya kesempatan kerja dalam bentuk wirausaha dan aneka jasa yang terkait dengan tata niaga

produk kelapa eksotik sehingga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.

2. Karet

Lokasi yang merupakan wilayah basis untuk pengembangan komoditi karet dapat diidentifikasi dan terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Lokasi tersebut adalah :

Tabel 4.3
Sebaran Lokasi Basis Komoditi Karet

SEBARAN LOKASI BASIS KOMODITI KARET		NILAI LQ > 1		
KABUPATEN	KECAMATAN	KOMODITI BASIS SANGAT POTENSIAL	KOMODITI BASIS POTENSIAL	KOMODITI BASIS CUKUP POTENSIAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PANDEGLANG	Munjul	19,21		
	Angsana	17,3		
	Patia		4,12	
	Cigeulis			1,2
LEBAK	Cikulur	14,31		
	Cimarga	12,54		
	Leuwidamar	25,75		
	Muncang	38,81		
	Sobang		3,55	
	Bojongmanik	28,75		
	Maja	23,09		
	Sajira	44,24		
	Curugbitung	37,06		
	Cipanas	31,81		
	Cileles	21,56		
	Gunungkencana	10,54		
	Cijaku		3,32	
	Malingping		6,13	
	Bayah		5,60	
Cibeber		3,26		
Cilograng		9,23		

Sumber : Masterplan Perkebunan 2007

Terdapat 20 kecamatan yang sangat potensial untuk pengembangan karet. Ditinjau dari perkembangan harga lump rakyat juga mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir ini, yang mengindikasikan bahwa komoditas karet laku di pasar.

Berdasarkan hasil perhitungan *shift share* nilai produksi untuk tanaman karet diidentifikasi wilayah unggulan komoditi karet yang berada di lokasi sebagai berikut :

Tabel 4.4
Sebaran Lokasi Unggulan Komoditi Karet

SEBARAN LOKASI UNGGULAN KOMODITI KELAPA		KRITERIA			INTERPRETASI
KABUPATEN	KECAMATAN	SIR	PIR	DIR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PANDEGLANG	MUNJUL	+	-	+	SIR (+) menunjukkan komoditi karet memiliki potensi peretumbuhan produktivitas lebih cepat dibandingkan dengan komoditi lain. PIR(+) menunjukkan gejala spesialisasi dan lokalisasi pada komoditi karet DIR(+) menunjukkan adanya pertumbuhan komoditi karet secara cepat akibat faktor akses lebih baik ke wilayah pasar atau ke bahan baku.
	ANGSANA	+	+	-	
LEBAK	RANGKASBITUNG	+	-	+	
	CIBADAK	+	+	+	
	WRUNGGUNUNG	+	+	-	
	CIPANAS	+	+	+	
	CILELES	+	+	+	
	GUNUNGKENCANA	+	+	+	
	CIJAKU	+	-	+	
	BANJARSARI	+	+	+	
	MALINGPING	+	+	+	
	PANGGARANGAN	+	-	+	
	BAYAH	+	-	+	
	CIBEBER				
		+	-	+	

masterpan Perkebunan 2007

3. Kelapa Sawit

Wilayah basis untuk pengembangan komoditi kelapa sawit hanya terpadat di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dengan kriteria SIR (+), PIR (-), dan DIR (+), yang berarti terdapat gejala spesialisasi dan lokalisasi pada komoditi kelapa sawit, serta menunjukkan adanya pertumbuhan secara cepat akibat faktor akses lebih baik ke wilayah pasar atau ketersediaan bahan baku. pengusahaannya didominasi oleh PBN dan mulai dilirik oleh PBS sehingga secaramenyeluruh, modal dan manajerial dianggap telah memiliki kemampuan yang memadai.

4. Cengkeh

Komoditi cengkeh dapat dikembangkan pada wilayah basis di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak, dengan lokasi sebagai berikut :

Tabel 4.5
Sebaran Lokasi Basis Komoditi Cengkeh

Sebaran lokasi basis komoditi cengkeh			Nilai $lq > 1$	
Kabupaten	Kecamatan	Komoditi basis sangat potensial	Komoditi basis potensial	Komoditi basis cukup potensial
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SERANG	Ciomas		6,35	
	Baros			1,20
	Padarincang		2,49	
	Cinangka		4,83	
	Pabuaran			1,44
	Waringinkurung			1,96
	Pamarayan		2,05	
	Kopo			1,86
	Petir			1,20
	Walantaka		2,98	
PANDEGLANG	Curug			1,72
	Tunjungteja			1,73
	Pandeglang	12,88		
	Cadasari		4,02	
	Banjar		2,03	
	Kaduhejo		6,57	
	Cimanuk		8,04	
	Cupeucang		8,60	
	Mandalawangi	11,18		
	Saketi		4,07	
	Cisata		5,18	
	Bojong		3,68	
	Picung		3,86	
	Munjul		3,22	
	Angsana		4,18	
	Cikeudal		3,37	
	Jiput			1,66
	Labuan			1,71
	Pagelaran			1,27
	Patia			1,28
	Cigeulis		2,24	
	Cimanggu		2,31	
	Cibaliung			1,71
Cikeusik		4,47		
Panimbang		5,56		
Sumur		3,57		
LEBAK	Rangkasbitung		3,15	
	Cibadak		4,85	
	Leuwidamar		2,80	
	Muncang			1,61
	Sobang			1,82
	Bojongmanik		2,90	
	Maja		2,26	
	Curugbitung		2,10	
	Cipanas	16,56		
	Wanasalam			1,92
	Bayah	17,86		
	Cibeber	12,85		
Colograng		9,13		

Sumber : Masterplan Perkebunan 2007

Berdasarkan hasil analisis *shift share* wilayah unggulan komoditi cengkeh berada pada lokasi sebagai berikut :

Tabel 4.6
Sebaran Lokasi Unggulan Komoditi Cengkeh

Sebaran lokasi unggulan komoditi cengkeh		Kriteria			Interpretasi
Kabupaten	Kecamatan	SIR	PIR	DIR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SERANG	Bojonegara	+	-	+	SIR (+) menunjukkan komoditi cengkeh memiliki potensi peretumbuhan produktivitas lebih cepat dibandingkan dengan komoditi lain. PIR(+) menunjukkan gejala spesialisasi dan lokalisasi pada komoditi cengkeh DIR(+) menunjukkan adanya pertumbuhan komoditi cengkeh secara cepat akibat faktor akses lebih baik ke wilayah pasar atau ke bahan baku.
	Puloampel	+	+	+	
	Anyer	+	+	+	
	Padarincang	+	+	-	
	Cinangka	+	-	+	
	Pabuaran	+	-	+	
	Waringinkurung	+	-	+	
	Mancak	+	+	+	
	Pamarayan	+	+	-	
	Petir	+	+	-	
	Walantaka	+	+	-	
	Jawilan	+	-	+	
	Kramatwatu	+	-	+	
PANDEGLANG	Pandeglang	+	+	+	
	Cadasari	-	+	+	
	Kaduhejo	+	-	+	
	Cimanuk	+	+	-	
	Cipeucang	+	-	+	
	Mandalawangi	+	+	+	
	Saketi	+	+	-	
	Bojong	+	-	+	
	Picung	+	+	-	
	Munjul	-	+	+	
	Angsana	+	+	-	
	Panimbang	+	-	+	
	LEBAK	Warunggunung	+	+	+
Cikulur		+	+	+	
Leuwidamar		+	-	+	
Maja		+	-	+	
Cipanas		+	+	+	
Cileles		+	+	+	
Gunungkencana		+	+	+	
Banjarsari		+	+	+	
Cibeber	+	-	+		

Sumber : Masterplan Perkebunan 2007

5. Kopi

Lokasi wilayah basis pengembangan komoditi kopi di Provinsi Banten terdapat di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, tepatnya berada pada lokasi berikut :

Tabel 4.7
Sebaran Lokasi Basis Komoditi Kopi

Sebaran lokasi basis komoditi kopi		Nilai LQ > 1		
Kabupaten	Kecamatan	Komoditi basis sangat potensial	Komoditi basis potensial	Komoditi basis cukup potensial
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SERANG	Anyer			1,93
	Ciomas		9,24	
	Baros		7,05	
	Padarincang		3,17	
	Cinangka		6,60	
	Pabuaran		3,39	
	Mancak			1,23
	Cikeusal		2,01	
	Pamarayan		5,27	
	Kopo		3,41	
	Petir		3,02	
PANDEGLANG	Tunjungteja			1,05
	Ciruas			1,33
	Pandeglang		8,17	
	Cadasari		8,73	
	Banjar		4,81	
	Kaduhejo		8,48	
	Cimanuk		9,02	
	Cipeucang	10,93		
	Mandalawangi	25,14		
	Saketi		3,81	
	Cisata		5,96	
	Bojong		3,30	
	Picung		3,45	
	Munjul		2,95	
	Angsana		2,77	
	Cikeudal		6,97	
	Jiput			1,94
	Labuan			1,35
	LEBAK	Cikeusik		3,24
Rangkasbitung			3,60	
Cibadak			2,73	
Warunggunung				1,65
Cikulur				1,99
Cimarga				1,05
Leuwidamar			4,70	
Muncang				1,49
Sobang			2,44	
Bojongmanik			3,24	
Curugbitung			3,06	
Cipanas				1,70
Cileles			3,65	
Malingping				1,33
Bayah			3,06	
Cibeber		7,08		
Cilograng		5,01		

Tanaman kopi di Provinsi Banten mempunyai basis di 48 kecamatan, diantaranya 35 kecamatan merupakan basis potensial untuk tanaman kopi. Pengembangan komoditi kopi ini sebaiknya dengan menerapkan system budidaya perkebunan kerkelanjutan serta mengupayakan adanya specialty coffee atau kopi spesial daerah, baik spesial dalam varietas, biji, maupun dalam bentuk hasil olahannya. Lokasi wilayah unggulan untuk pengembangan komoditas kopi adalah :

Tabel 4.8
Sebaran Lokasi Unggulan Komoditi Kopi

Sebaran lokasi unggulan komoditi kopi		Kriteria			Interpretasi
Kabupaten	Kecamatan	SIR	PIR	DIR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SERANG	Bojonegara	+	-	+	SIR (+) menunjukkan komoditi kopi memiliki potensi pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan komoditi lain. PIR(+) menunjukkan gejala spesialisasi dan lokalisasi pada komoditi kopi
	Baros	+	-	+	
	Pabuaran	+	-	+	
	Waringinkurung	+	-	+	
	Mancak	+	+	-	
	Kopo	+	+	+	
	Kramatwatu	+	-	+	
	Ciruas	+	-	+	
PANDEGLANG	Pandeglang	+	-	+	DIR(+) menunjukkan adanya pertumbuhan komoditi kopi secara cepat akibat faktor akses lebih baik ke wilayah pasar atau ke bahan baku
	Cadasari	+	+	-	
	Banjar	-	+	+	
	Kaduhejo	+	+	-	
	Cimanuk	+	-	+	
	Cipeucang	+	+	+	
	Mandalawangi	+	+	+	
	Saketi	+	-	+	
LEBAK	Bojong	-	+	+	
	Picung	+	+	-	
	Cibadak	+	+	+	
	Warunggunung	+	+	-	
	Cikulur	+	-	-	
	Leuwidamar	+	-	+	
	Maja	+	-	+	
	Sajira	+	-	+	
	Cileles	+	+	+	
	Gunungkencana	+	+	+	
Malingping	+	+	+		
Cibeber	+	-	+		

6. Kakao

Wilayah basis pengembangan kakao terdapat di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, sebarannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Sebaran Lokasi Basis Komoditi Kakao

Sebaran lokasi basis komoditi kakao		Nilai LQ > 1		
Kabupaten	Kecamatan	Komoditi basis sangat potensial	Komoditi basis potensial	Komoditi basis cukup potensial
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PANDEGLANG	Saketi	12,46		
	Cisata		7,68	
	Bojong		8,51	
	Picung		9,76	
	Cigeulis		2,60	
	Panimbang	11,24		
LEBAK	Cikukur			1,36
	Cimarga	132,42		
	Bojongmanik		6,10	
	Cileles		4,81	
SERANG	Gunungkencana		2,08	
	Cinangka			
	Gunungsari			
	Mancak			
	Anyer			

Sumber Masterplan Perkebunan 2007

Di Kabupaten Pandeglang terdapat 6 kecamatan potensial sebagai basis komoditi kakao, sedangkan di Kabupaten Lebak terdapat 5 kecamatan. Meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan, berkembangnya teknologi mengakibatkan meningkatnya permintaan kakao. Saat ini konsumsi kakao Indonesia mencapai 0,06 kg per kapita per tahun, sementara di negara Amerika Serikat telah mencapai 5,3 kg per kapita per tahun. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pengembangan kakao masih sangat prospektif.

Lokasi-lokasi yang dapat dijadikan wilayah unggulan pengembangan kakao di Provinsi Banten adalah :

Tabel 4.10
Sebaran Lokasi Unggulan Komoditi Kakao

Sebaran lokasi unggulan komoditi kopi		Kriteria			Interpretasi
Kabupaten	Kecamatan	SIR	PIR	DIR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PANDEGLANG	Saketi	+	+	+	SIR (+) menunjukkan komoditi kakao memiliki potensi peretumbuhan produktivitas lebih cepat dibandingkan dengan komoditi lain.
	Bojong	-	+	+	
	Picung	+	-	+	
	Cigeulis	+	+	-	
	Panimbang	+	+	+	
LEBAK	Cimarga	+	+	+	PIR(+) menunjukkan gejala spesialisasi dan lokalisasi pada komoditi kakao DIR(+) menunjukkan adanya pertumbuhan komoditi kakao secara cepat akibat faktor akses lebih baik ke wilayah pasar atau ke bahan baku
	Bojongmanik	+	-	+	
	Cileles	+	-	+	
	Gunungkencana	+	-	+	
SERANG	Cinangka	+	+	+	
	Gunungsari	+	-	+	
	Mancak	+	-	+	
	Anyer	+	-	+	

Sumber : Masterplan Perkebunan 2007

7. Aren

Wilayah basis untuk pengembangan komoditi Aren di Provinsi Banten dapat diidentifikasi berada di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Sebaran Lokasi Basis Komoditi Aren

Sebaran lokasi basis komoditi aren		Nilai LQ > 1		
Kabupaten	Kecamatan	Komoditi basis sangat potensial	Komoditi basis potensial	Komoditi basis cukup potensial
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PANDEGLANG	Munjul		8,26	
	Angsana		4,09	
	Cikeusik		4,64	
LEBAK	Rangkasbitung		6,61	
	Cibadak		6,53	
	Warunggunung		4,63	
	Cikulur		3,15	
	Cimarga		2,28	
	Leuwidamar	72,7		
	Muncang	48,09		
	Sobang	239,25		
	Bojongmanik	80,10		
	Maja		5,62	
	Sajira	13,64		
	Curugbitung		6,11	
	Cipanas		7,40	
	Cileles	11,46		
	Gunungkencana		7,40	
	Cijaku		6,11	
	Malingping		6,08	
Wanasalam				1,25
	Panggarangan		2,18	
	Cihara	46,55		
	Bayah			
	Cibeber	59,85		
	Cilograng	30,80		
SERANG	Ciomas			
	Padarincang			
	Cinangka			
	Pabuaran			
	Mancak			

Permintaan gula aren semakin meningkat sejalan dengan perkembangan penggunaan gula aren yang tidak hanya sebagai pemanis makanan dan minuman melainkan digunakan sebagai bahan obat herbal. Selain itu produk gula aren sudah berkembang dalam bentuk gula semut, yang pasarnya tidak hanya di dalam negeri melainkan sampai di ekspor. Hal ini menjadikan peluang untuk pengembangan komoditi aren yang masih prospektif.

Lokasi wilayah unggulan pengembangan komoditi aren di Provinsi Banten lebih banyak terdapat di Kabupaten Lebak, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Sebaran Lokasi Unggulan Komoditi Aren

Sebaran lokasi unggulan komoditiAren		Kriteria			Interpretasi
Kabupaten	Kecamatan	SIR	PIR	DIR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PANDEGLANG	Munjul	+	+	-	SIR (+) menunjukkan komoditi aren memiliki potensi peretumbuhan produktivitas lebih cepat dibandingkan dengan komoditi lain. PIR(+) menunjukkan gejala spesialisasi dan lokalisasi pada komoditi aren DIR(+) menunjukkan adanya pertumbuhan komoditi aren secara cepat akibat faktor akses lebih baik ke wilayah pasar atau ke bahan baku
LEBAK	Rangkasbitung	+	-	+	
	Cibadak	+	+	-	
	Warunggunung	+	-	+	
	Muncang	+	-	+	
	Cipanas	+	+	+	
	Cileles	+	+	-	
	Gunungkencana	+	+	+	
	Banjarsari	+	+	-	
	Malingping	+	+	+	
	Cibeber	+	-	+	
	Sobang				
	cihara				

Sumber : Masterplan Perkebunan 2007

C. Arah Pengembangan

Sistem usaha perkebunan di Provinsi Banten belum sepenuhnya dikembangkan melalui sistem usaha agribisnis secara terpadu. Sistem usaha agribisnis merupakan totalitas atau kesatuan kinerja yang terdiri dari berbagai macam subsistem, yang terdiri dari subsistem hulu yang berupa kegiatan ekonomi input produksi, informasi dan teknologi, subsistem usaha tani, yaitu kegiatan produksi primer komoditas perkebunan, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem penunjang, yaitu dukungan sarana dan prasarana serta lingkungan yang kondusif bagi pengembangan agribisnis perkebunan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa agribisnis perkebunan yang dikelola melalui kerjasama inti-plasma ternyata kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Misalnya, petani plasma komoditas kelapa sawit cenderung menuju ke arah serba kurang (marjinal), sedangkan inti semakin kuat, untuk mengatasi hal tersebut perlu diupayakan : (a) integrasi hubungan industri hilir dengan petani, (b) penguatan kelembagaan di tingkat petani, (c) pembinaan terhadap petani, (d) perbaikan kondisi infrastruktur jalan, dan (e) pemberdayaan komisi harga di tingkat petani terhadap harga pabrik.

Isu strategis berdasarkan RPJMD Banten TH. 2012 – 2017, terdiri dari infrastruktur kewilayahan, ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan kesehatan. Dalam mendukung keberhasilan pembangunan tersebut, dengan memperhatikan keragaan hasil pembangunan yang telah dicapai oleh sub sektor perkebunan, perubahan lingkungan strategis, prospek dan potensi serta permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi, maka tindakan yang perlu ditempuh adalah :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha perkebunan, melalui penerapan ilmu dan teknologi (IPTEK) dan usaha intensifikasi, rehabilitas, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung dengan sistem penyuluhan dan pendampingan untuk pemberdayaan petani secara intensif.
2. Memperkuat dan menumbuhkan jaringan usaha perkebunan yang terintegrasi antara subsistem hulu-usahatani-subsistem hilir.
3. Memperkokoh dan mengembangkan kelembagaan petani pekebun, sehingga menjadi kelembagaan yang kuat dan berfungsi yang menuju kearah perkoperasian.
4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perkebunan sehingga menjadi pandai dan professional melalui pelatihan dan pendampingan, baik bagi petani maupun petugas.
5. Peningkatan efisiensi usaha dan perluasan pasar melalui upaya peningkatan mutu, diversifikasi usaha, promosi dan perlindungan terhadap produk bermutu yang dihasilkan oleh masyarakat.
6. Peningkatan pengembangan wilayah perkebunan untuk meningkatkan produktifitas lahan sekaligus melakukan konservasi terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengacu pada karakteristik komoditas unggulan dan mekanisme pengelolaannya, maka secara umum arahan pengembangan perkebunan di Provinsi Banten ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) arahan, yaitu :

- a. Arahan pengembangan komoditas perkebunan kelapa sawit dan karet,
- b. Arahan pengembangan komoditas perkebunan kakao dan kopi,
- c. Arahan pengembangan komoditas perkebunan aren, cengkeh dan kelapa

1. Arahan Pengembangan Kakao dan Kopi

Kedua komoditas ini dibahas dalam satu paket arahan karena terdapat kemiripan dalam sistem pengelolaan maupun tipologi budidayanya. Komoditas kakao dan kopi biasa dikelola sebagai komoditas perkebunan dalam satuan lahan yang khusus dan luas.

Pengembangan kakao dan kopi Provinsi Banten ditempuh melalui swadaya petani. Peran serta pemerintah terbatas kepada pelayanan fasilitas, pendampingan, advokasi dan penciptaan iklim yang bertumpu pada peran serta masyarakat, walaupun ada peran pemerintah hanya memberikan input terbatas misalnya penyediaan bahan tanaman berupa benih/bibit unggul.

Arah pengembangan kakao dan kopi rakyat ditujukan untuk menumbuhkan motivasi petani melaksanakan gerakan pengembangan tanaman dalam suatu skala ekonomi melalui sistem agribisnis dalam suatu kawasan yang usahatani yang memenuhi skala ekonomi, saling bersinergi dan berkelanjutan. Pola pengembangannya adalah pola swadaya, yang dikelola dalam kelompok, lebih lanjut akan dikembangkan menjadi lembaga perkoperasian. Desain pengembangan perkebunan kakao dan kopi meliputi beberapa aspek antara lain : (1) aspek petani sebagai subjek pengembangan (target grup), (2) aspek lahan sebagai objek (target area), (3) aspek budidaya, (4) aspek panen dan pasca panen, (5) aspek pengolahan, dan (6) aspek pemasaran.

a. Aspek petani sebagai subjek pengembangan (Target Grup)

Petani sebagai subjek yang mempunyai minat untuk mengembangkan tanaman kakao dan kopi atas dasar kesadaran dan kepentingan petani harus bekerja sama dalam suatu wadah kelompok-kelompok tani.

Penumbuhan kelompok tani ini didasarkan kepada pendekatan hampan yakni kelompok tani yang lokasinya berbatasan/berada di suatu hampan dan pendekatan kelompok domisili yakni kelompok yang anggotanya berada pada suatu lokasi/kampung atau desa. Implementasi arahan ini tergantung pada kondisi di lapangan. Besarnya kelompok tani (luas kebun dan jumlah anggota) dilaksanakan atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas komunikasi antara anggota dalam kelompok dan bimbingan petugas lapangan.

Manfaat yang akan dicapai dalam kelompok adalah :

- 1) Sebagai kelas belajar yang efektif dalam menyerap dan menerapkan teknologi dalam usaha taninya.
- 2) Sebagai unit produksi bersama dalam pembangunan pemeliharaan kebun, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran.
- 3) Sebagai wadah kerjasama dalam memusyawarahkan masalah yang menyangkut usaha tani, kegiatan gotong royong dan sosial lainnya.

Dengan tumbuhnya kelompok tani yang terbina diharapkan dapat meningkatkan petani/kelompok tani dalam hal mencari, menyampaikan, memanfaatkan dan menganalisa, menyusun rencana kerja dan melaksanakannya, memupuk modal dengan cara menabung, memanfaatkan fasilitas dan menjalin kerjasama dengan pihak lain. Guna mencapai sasaran dengan menggunakan pola swadaya/pola koperasi maka kelompok tani ini selanjutnya diarahkan untuk membentuk suatu lembaga koperasi melalui langkah- langkah sebagai berikut :

- 1) Tahap pertama yaitu membentuk wadah kerjasama antar kelompok
 - 2) Tahap kedua menggabungkan wadah kerjasama dalam suatu gabungan yang lebih besar atau Gapoktan.
 - 3) Tahap ketiga membentuk koperasi (unit usaha produksi kakao dan kopi).
- b. Aspek Lahan Sebagai Objek (Target Area)

Lahan sebagai objek pengembangan ditetapkan pada suatu lokasi yang memiliki indikator-indikator bagi pengembangan kakao dan kopi dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain :

- 1) Aspek kesesuaian lahan dilihat dan agroklimat (iklim dan tanah)
- 2) Sesuai dengan rencana tata ruang dalam arti tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan-kegiatan sektor lain.
- 3) Tidak merupakan lahan sengketa.
- 4) Lokasi – lokasi pengembangan ditetapkan melalui survei lapangan dengan memperhatikan indikator- indikator sebagai berikut :
 - a) Memiliki ketinggian tempat sampai 600 m dpl;
 - b) Memiliki curah hujan antara 1.500-2.500 mm/tahun dengan bulan kering tidak lebih dari tiga bulan;
 - c) Memiliki tanah yang gembur dengan pH 6-7;
 - d) Temperature rata-rata bulanan 22,4° C-30,4° C.

Kelembaban udara dan cahaya matahari adalah faktor yang perlu diperhatikan. Hal ini dapat diatur dengan pemangkasan pohon pelindung dan tanaman kakao dan kopi secara teratur. Selanjutnya lokasi-lokasi yang telah dipilih di kedua kabupaten tersebut dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati masing-masing sebagai suatu sentra pengembangan kakao dan kopi. Mengingat pengembangan kakao di Kabupaten Lebak dan Pandeglang tersebut merupakan suatu pengembangan lintas Kabupaten maka selanjutnya dapat diusulkan kepada Gubernur Banten untuk menetapkan suatu kawasan

pengembangan guna pengembangan kakao dan kopi di Provinsi Banten.

Dalam budidaya kakao dan kopi diperlukan pohon pelindung baik pelindung tetap maupun pelindung sementara, oleh karena itu prioritas pembukaan lahan sebaiknya mempertimbangkan tersedianya pohon pelindung yang telah ada antara lain kelapa dan pisang.

c. Aspek Budidaya

Dalam rangka menyiapkan petani dan petugas untuk memiliki pengetahuan yang memadai mengenai teknis budidaya kakao maka perlu disusun suatu pedoman teknis budidaya. Beberapa hal mengenai teknis budidaya mulai dari persyaratan tumbuh, penyiapan lahan, penyiapan benih unggul, pengaturan jarak tanam, pemeliharaan sesuai teknologi anjuran, pencegahan erosi dan pengaturan pohon pelindung perlu disosialisasikan sedini mungkin.

d. Aspek Pengolahan Hasil

Hasil pengamatan bahwa pengolahan kakao dan kopi masih bersifat sederhana dan tidak ada industri pengolahan hasil dengan teknologi tinggi. Secara umum biji kakao dan kopi yang telah dipetik dari kebun hanya diolah secara tradisional mulai dari fermentasi hingga proses pengeringan. Setelah kering, biji kakao langsung dijual kepada pembeli baik pembeli pengumpul, pembeli besar, industri hilir maupun eksportir untuk diolah di industri pengolahan kakao di Provinsi Lampung atau Jakarta. Sementara itu, biji kopi selain dijual dalam bentuk kopi kering berasan juga dalam bentuk olahan sebagai kopi bubuk.

e. Aspek Pemasaran Hasil

Pemasaran hasil kakao maupun kopi yang terjadi pada saat ini terlihat bahwa peranan tengkulak sangat dominan. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan penyuluhan sehingga atas kesadaran dan kemauan sendiri petani membentuk dan mengembangkan kelompok tani serta membentuk koperasi petani kakao dan kopi. Melalui wadah tersebut maka

diharapkan akan meningkatkan *posisi tawar* petani dalam pemasaran hasilnya.

Mekanisme pemasaran pola swadaya yang diarahkan adalah sebagai berikut :

- 1) Petani menyerahkan hasil produksinya kepada kelompok tani dan selanjutnya kelompok tani membawa hasil produksi tersebut ke Koperasi untuk dijual kepada eksportir/*proccesor*/ pedagang antar daerah. Melalui koperasi tersebut diharapkan posisi tawar pihak petani kebun akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan cara pemasaran sebelumnya. Perkebunan Besar (negara dan swasta) dapat bertindak selaku bapak angkat/mitra usaha.
- 2) Jenis dan mutu hasil yang dipasarkan diarahkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 3) Pembayaran hasil penjualan kepada koperasi oleh eksportir/prosesor/pedagangantar pulau dilaksanakan lewat bank dengan memperhitungkan kredit koperasi bagi para petani yang mengambil kredit bank.
- 4) Koperasi menyerahkan sisa hasil penjualan petani lewat kelompok tani dengan memperhitungkan kredit / uang muka yang telah diambil petani.
- 5) Dinas Kehutanan dan Perkebunan selaku pembina terus memantau mekanisme ini agar tidak terjadi penyimpangan dari eksese-eksese yang tidak diinginkan.

2. Arahana Pengembangan Kelapa Sawit dan Karet

a. Peremajaan Tanaman

Tanaman kelapa sawit dan atau tanaman karet pada usia maksimum 25 tahun, atau pada tanaman yang sudah rusak atau tidak produktif lagi perlu dilakukan peremajaan tanaman atau sering disebut *replanting*. Menurut data Statistik Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Tahun 2013, terdapat 26.545,74 ha luas areal tanaman yang sudah tua, rusak. Kondisi ini memiliki kesamaan pada tanaman yang ada pada Perusahaan

Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) yang dilaksanakan oleh PTPN VIII dengan tanaman kelapa sawit di Banten Selatan mulai penanaman sejak tahun 1981/1988, yang sebarannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.13

Waktu Penanaman, Lokasi dan Luas Areal Penanaman Kelapa Sawit Melalui PIR-BUN Wilayah Banten

Tahun Tanam	Lebak (Ha)	Pandeglang (Ha)	Jumlah (Ha)
1981/1982	494.68	-	494.68
1982/1983	762.76	1,050.77	1813.
1983/1984	706.84	744.56	1451.40
1984/1985	737.10	612.71	13.49.81
1985/1986	135.38	360.80	496.18
1986/1987	415.31	-	415.31
1987/1988	47.37	-	47.37
Jumlah	3.299,44	2.768,84	6.068,28

Sumber : Perkebunan Nusantara, PTPN VIII, 2005

Berdasarkan tabel tersebut di atas terdapat tanaman yang sudah harus diremajakan secara bertahap berdasarkan waktu tanam, yaitu waktu tanam 1981/1982 menjadi prioritas utama untuk penanaman dengan luas 494,68 Ha, namun berdasarkan umur dan kondisi tanaman, lokasi penanaman sawit yang di prioritaskan untuk segera diremajakan adalah seluas 2.090,10 hektar seperti pada Tabel berikut :

Tabel 4.14

Lokasi Peremajaan Kelapa Sawit Prioritas Pertama

No	Nama Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Tahun Tanam
1	Bojongjuruh	Banjarsari	270,00	1981-1983
2	Cilegong ilir	Banjarsari	41,50	1982-1983
3	Kerta	Banjarsari	219,00	1981-1982
4	Kertaraharja	Banjarsari	185,50	1981-1982
5	Leubak Keusik	Banjarsari	72,00	1982-1983
6	Leuwi Ipuh	Banjarsari	120,70	1982-1983

7	Tamansani	Banjarsari	72,30	1982-1983
8	Cilangkap	Malingping	34,50	1982-1983
9	Cihara	Panggarangan	60,50	1981-1982
10	Hegamanah	Panggarangan	56,30	1982-1983
11	Panggarangan	Panggarangan	25,60	1982-1983
12	Cikadongdong	Cikeusik	203,30	1982
13	Cikeusik	Cikeusik	152,60	1982
14	Curugciung	Cikeusik	201,60	1982
15	Nanggala	Cikeusik	282,00	1982
16	Sukaseneng	Cikeusik	92,70	1982
Jumlah			2.090,10	

Sumber : Perkebunan Nusantara, PTPN. VIII, 2005

Secara keseluruhan tanaman kelapa sawit milik masyarakat peserta PIR BUN di Provinsi banten yang kondisinya 80% kurang bagus dan produktivitasnya sudah menurun, perlu segera diremajakan. Untuk mengadakan peremajaan perlu diadakan perencanaan yang matang, karena hingga sekarang posisi petani plasma masih menanggung banyak hutang kepada perkebunan inti. Perlu diadakan musyawarah antara pihak petani dengan PTPN VIII yang difasilitasi oleh pemerintah.

b. Konversi Tanaman

Konversi adalah pengalihan areal pertanaman dari jenis tanaman yang sudah diusahakan ke jenis tanaman baru yang akan diusahakan. Dalam rangka pengembangan tanaman kelapa sawit, PTPN VIII telah melakukan pembukaan areal perkebunan kelapa sawit dari bekas perkebunan tanaman lain. Tanaman yang direkomendasikan untuk dikonversi ke tanaman kelapa sawit adalah tanaman karet. Konversi ini sudah dilakukan oleh pihak PTPN VIII di wilayah perkebunan karet Bojong Datar dengan lokasi kebun Bojong Datar dan Cileles. Konversi dilakukan karena tanaman karet sudah tidak produktif, baik disebabkan karena tanaman sudah tua atau disebabkan kesalahan penyadapan (sadap mati) serta harga karet / latek yang terus menurun dan berfluktuatif. Pada Tabel 5.20 disajikan rencana lokasi konversi tanaman karet ke kelapa sawit berdasarkan inventarisasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2005.

Tabel 4.15

Konversi Karet menjadi Kelapa Sawit

Lokasi (Kecamatan)	Desa	Tanaman yang dikonversi	Luas (Ha)	Keterangan
Munjul	Panacaran Curuglanglang Gunungbatu Cibitung	Karet	1.600	Rusak
Angsana	Cipinang, Kadubadak	Karet	2.000	Rusak
Malingping	Kersaratu Malingping Senanghati	Karet	500	Rusak
Perkebunan Pasiwaringin	Pasirpanjang	Karet	500	Rusak dan tua
Jumlah			4.600	

Sumber : Dinas Hutbun Kabupaten Pandeglang, 2005

Luas tanaman yang dikonversi ke kelapa sawit, di satu sisi merupakan suatu peluang untuk pengembangan kelapa sawit, namun di sisi lain merupakan tantangan yang harus segera dicarikan solusinya, terutama masalah pendanaan untuk konversi. Diperlukan biaya yang cukup besar mulai dari penebangan atau pembukaan lahan baru, penanaman sampai pemeliharaan sebelum produktif. Untuk pembukaan areal baru komoditas kelapa sawit diarahkan sebagai berikut, untuk Kabupaten Lebak mengarah ke Kecamatan Wanasalam, Panggarangan, Gunung Kencana, Cijaku, leuwidamar dan Cileles, sedangkan untuk Kabupaten Pandeglang mengarah ke Kecamatan Bojong, Munjul, Angsana, Cikeusik, Cibaliung dan Cimanggu.

c. Pengembangan Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

Kapasitas produksi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kertajaya PTPN VIII Wlayah Banten yang berada di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak, semula sebesar 30 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam, lama pabrik beroperasi selama 20 jam (dua sift kerja), kapasitas produksi sehari semalam sebanyak 600 ton TBS dan selama setahun kapasitas produksi sebesar 216.000 ton TBS. Luas lahan kelapa sawit saat ini di Provinsi Banten 20.261,15 ha, kapasitas produksi pabrik sudah tidak mampu menampung produksi sawit dari petani dan PTP.VIII untuk mengatasi permasalahan tersebut, PTPN VIII Wiayah Banten

telah meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 60 Ton TBS per jam.

3. Arahannya Pengembangan Aren, Cengkeh dan Kelapa.

Secara umum arahannya pengembangan ketiga komoditas tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) hal, yaitu :

- a. Pengembangan sarana dan prasarana agribisnis,
- b. Peningkatan produktivitas,
- c. Peningkatan mutu dan diversifikasi produk olahan,
- d. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan, dan
- e. Pengembangan pasca panen, pengolahan (alsin) dan pemasaran sebagai berikut :

1) Pengembangan Agribisnis

Pengembangan agribisnis dalam suatu kawasan komoditas perkebunan memerlukan kelengkapan sarana dan prasarana guna mewujudkan sinergitas subsistem hulu dengan subsistem hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan komoditas, sehingga pelaksanaan pembangunan perkebunan berkelanjutan dapat diwujudkan. Keperluan sarana dan prasarana dalam pengembangan agribisnis tersebut meliputi :

- a) Penyiapan paket usulan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan makro diantaranya perdagangan dan investasi, kepastian usaha, kepastian penataan ruang dan pemanfaatan lahan.
- b) Penyiapan paket kebijakan peningkatan kesejahteraan dan kapabilitas petani, pengembangan kerjasama / kemitraan dan pengembangan SDM dan IPTEK,
- c) Penyiapan kebijakan pengembangan lembaga keuangan,
- d) Penyiapan profil dan paket pedoman teknis budidaya.
- e) Penyusunan rancangan dan pengembangan kawasan komoditas Aren, Cengkeh dan Kelapa

2) Peningkatan Produktivitas

Upaya meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan daya saing, yang antara lain melalui :

- a) Pengembangan perbenihan di tingkat kelompok tani dan penggunaan benih unggul,
 - b) Peningkatan mutu tanaman melalui teknis budidaya anjuran, baik dalam melaksanakan intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi,
 - c) Pengembangan usaha tani pekebun secara terpadu
 - d) Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
- 3) Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk Olahan
- Hal ini dimaksudkan untuk melebarkan peluang pasar dan sekaligus meningkatkan pendapatan, yang antara lain melalui :
- a) Pengembangan penanganan teknologi panen dan pasca panen.
 - b) Pengembangan produk turunan, produk samping dan pemanfaatan limbah serta memperhatikan selera pasar baik cita rasa maupun packaging.
- 4) Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan
- Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan posisi tawar dari petani dan kerjasama usaha sehingga mampu mewujudkan efisiensi dan keberlanjutan usaha perkebunan, yang antara lain melalui :
- a) Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan asosiasi petani.
 - b) Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.
 - c) Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kemitraan usaha perkebunan.
 - d) Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan pusat kerjasama pengembangan koditas perkebunan.
 - e) Peningkatan kemampuan SDM perkebunan melalui pendidikan, pelatihan, magang dan pendampingan.
 - f) Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan lembaga pembiayaan perdesaan.
 - g) Sosialisasi dan fasilitasi penerapan restrukturisasi usaha perkebunan.

h) Sosialisasi dan pengembangan pusat-pusat penumbuhan agribisnis perkebunan.

5) Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran

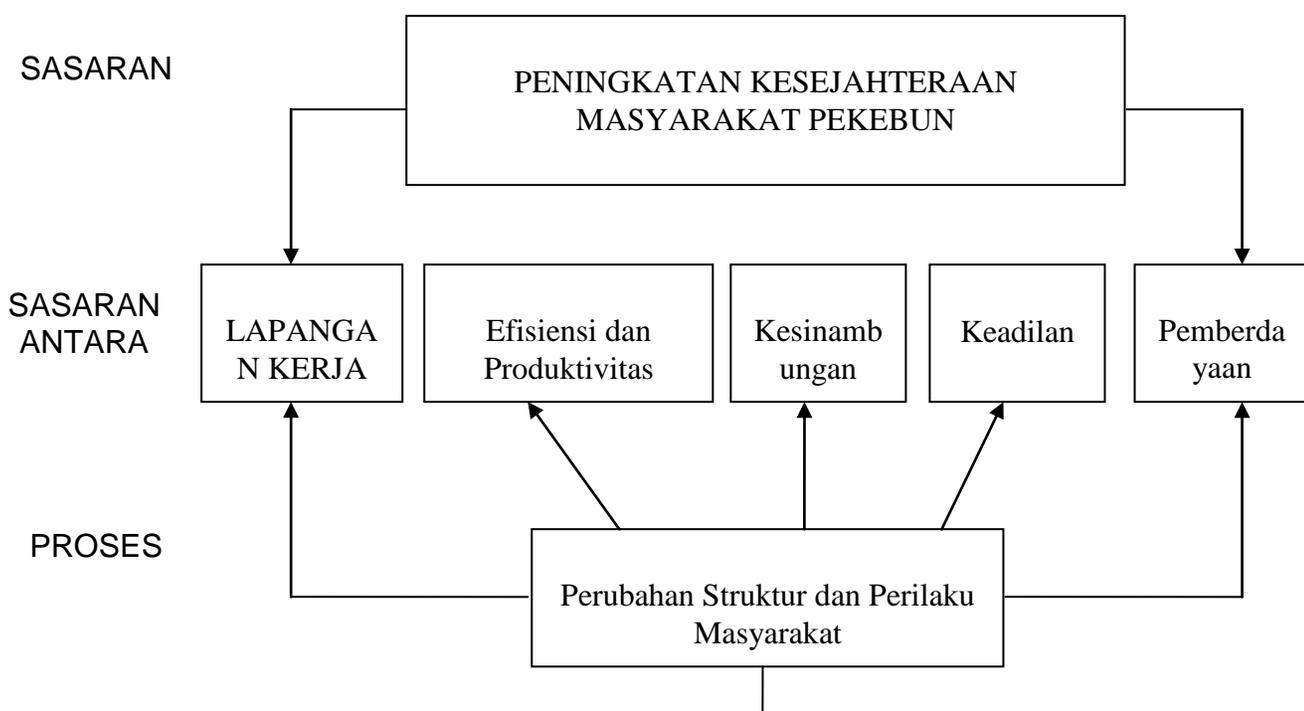
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan posisi tawar dari petani sehingga pendapatan petani dapat meningkat, yang antara lain melalui :

- a) Adanya pilot proyek penerapan unit pengolahan tepat guna di perdesaan termasuk meningkatkan kapasitas pengolahan dan pemasaran yang telah dilaksanakan masyarakat.
- b) Adanya unit informasi pasar yang disosialisasikan secara luas dan rutin.

D. Kerangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Perubahan paradigma pembangunan pertanian, termasuk perkebunan sebagai akibat dari proses reformasi yang mengutamakan demokratisasi, transparansi, kesadaran lingkungan dan otonomi daerah menuntut terjadinya mekanisme berbagai perubahan dari yang semula bersifat instruktif (atas ke bawah) menjadi pendekatan langsung yang dapat memecahkan masalah di lapang (*participatory problem solving*). Untuk mengetahui masalah di lapang, perlu dilakukan penilaian dan kerjasama antara agen pembaharuan dengan petani untuk merumuskan langkah-langkah yang harus dibuat untuk melakukan perubahan.

Kerangka konseptual pembangunan perkebunan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perkebunan adalah seperti pada Gambar di bawah ini:



1. Peningkatan kesempatan kerja.

Pelaksanaan pembangunan akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, hal ini membutuhkan peningkatan mutu sumberdaya manusia dan usaha masyarakat. Peningkatan mutu SDM ini dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani untuk mengoptimalkan usahanya secara berkelanjutan.
- b. Memfasilitasi dan mendorong kemampuan petani untuk dapat mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya dalam memperkuat dan mempertanggungjawab usahanya.
- c. Menumbuhkan kebersamaan dan mengembangkan kemampuan petani dalam mengelola kelembagaan petani dan kelembagaan usaha serta menjalin kemitraan.

2. Peningkatan efisiensi dan produktivitas

Usaha peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan produktivitas melalui penerapan teknologi budidaya yang baik (GAP), memperhatikan keharmonisan ekologi dan konservasi sumberdaya sehingga dapat member manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Upaya yang perlu ditempuh adalah :

- a. Mendorong pengembangan komoditas unggulan yang merupakan komoditas potensial di daerah, sesuai dengan peluang pasar, karakteristik dan potensi wilayah dengan penerapan teknologi budidaya yang baik.
- b. Optimasi pemanfaatan sumberdaya lahan, seperti pemanfaatan lahan pekarangan, pengembangan lahan pangan, lahan cadangan dan sisa asset lahan lainnya dengan pengembangan cabang usahanya lain yang sesuai.
- c. Mendorong pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan untuk mendukung penumbuhan sentra-sentra kegiatan ekonomi pada wilayah khusus, wilayah penyangga dan wilayah pemekaran.
- d. Mendorong pengembangan aneka produk perkebunan serta upaya peningkatan mutu untuk memperoleh peningkatan nilai tambah.

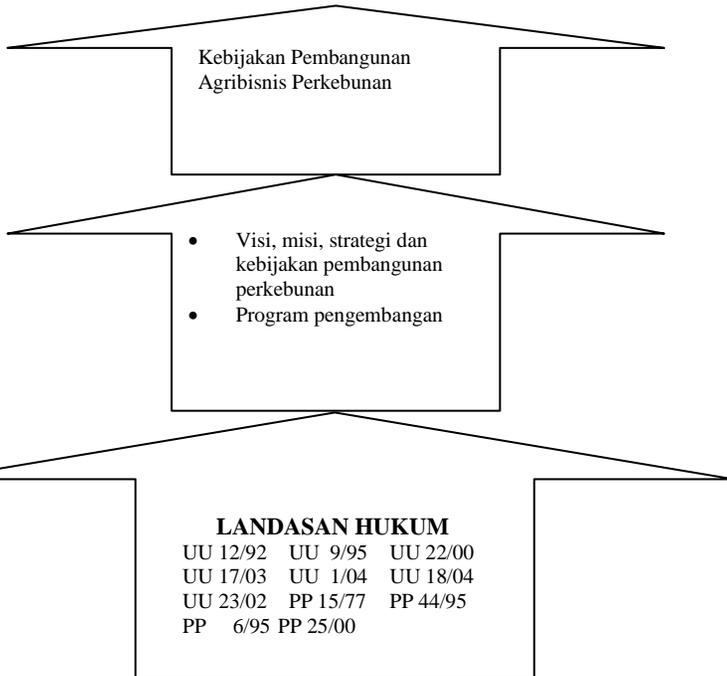
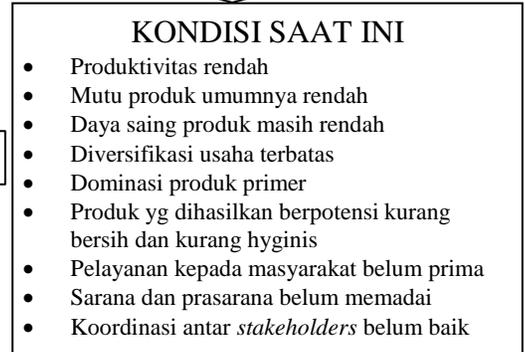
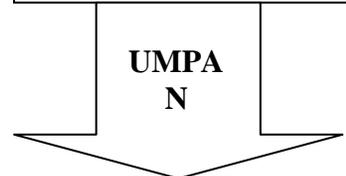
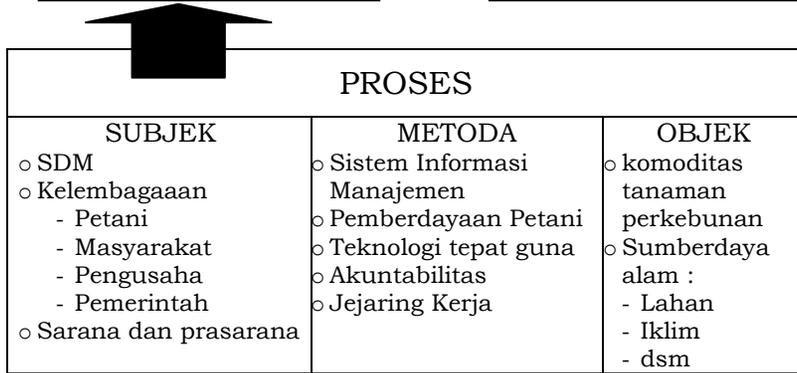
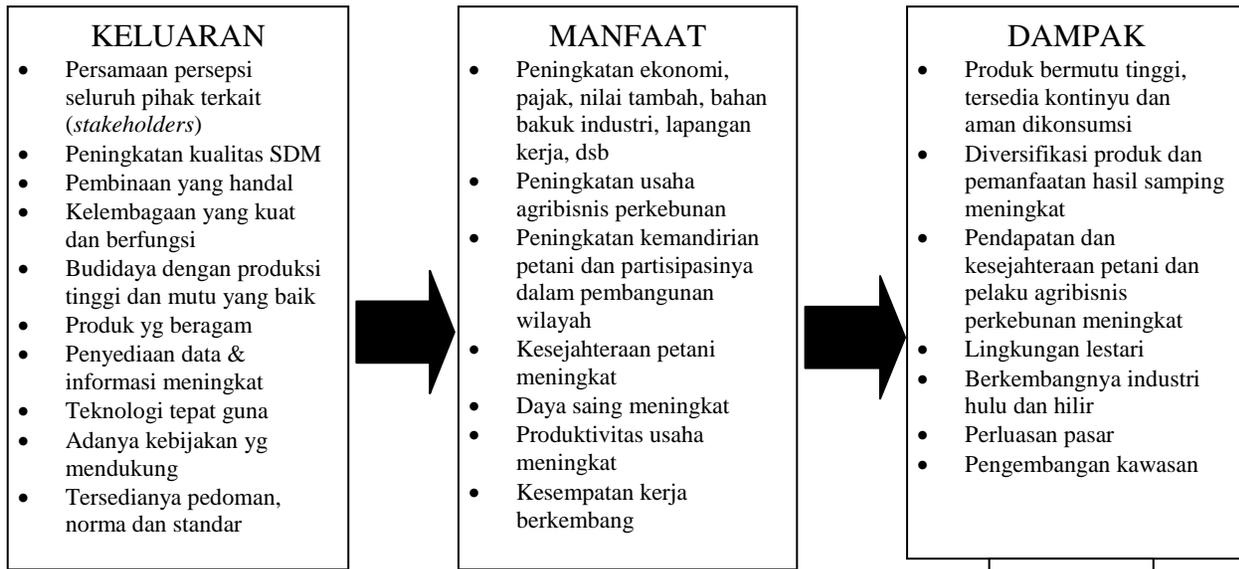
- e. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan.
- f. Meningkatkan upaya pengembangan system informasi mencakup aspek teknologi, pasar, manajemen dan modal.

3. Kestinambungan.

Agar rangkaian kegiatan dalam program yang telah ditetapkan dapat berlanjut berkesinambungan (*sustainable*), diperlukan pemahaman yang mendalam dari masyarakat. Implementasi program hendaknya cukup adaptif dengan kondisi biofisik dan sosial-ekonomi masyarakat. Upaya yang perlu ditempuh adalah :

- a. Meningkatkan penerapan sistem pertanian konservasi pada wilayah perkebunan sesuai kaidah konservasi lahan dan air.
- b. Meningkatkan penerapan paket teknologi ramah lingkungan.
- c. Meningkatkan dukungan dalam rangka rehabilitasi lahan kritis, DAS dan pengembangan perkebunan di kawasan penyangga untuk mengurangi gangguan terhadap kawasan lindung.
- d. Meningkatkan penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati serta teknologi pemanfaatan limbah usaha perkebunan yang ramah lingkungan.

KEADAAN YANG DI INGINKAN



Gambar 4.2. Bagan Pembangunan Perkebunan

BAB V PENUTUP

Tujuan Pembangunan Perkebunan adalah terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi pada wilayah kawasan perkebunan berbasis komoditas.

Rencana Pembangunan Perkebunan ini diharapkan dapat menjadikan dasar bagi penyelenggaraan pembangunan perkebunan baik di lingkup Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Dalam implementasinya Rencana Pembangunan Perkebunan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus disesuaikan dengan rencana strategis lainnya yang berkaitan dengan Pembangunan perkebunan di Provinsi Banten.

Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O